

**IMPLEMENTASI APLIKASI SIMERAK LANGKAT DALAM
PELAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

OLEH :

**KHOIRUL MA'ARIF
231801039**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI APLIKASI SIMERAK LANGKAT DALAM
PELAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



OLEH :

**KHOIRUL MA'ARIF
231801039**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 3/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat

Nama : Khoirul Ma'arif

NPM : 231801039

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik




Dr. Adam, S.E. M.AP

Direktur




Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 16 April 2026

Nama : Khoirul Ma'arif

NPM : 231801039



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Sekretaris	: Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP
Pembimbing I	: Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing II	: Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Penguji Tamu	: Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2026



Khoirul Ma'arif

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Ma'arif
NPM : 231801039
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

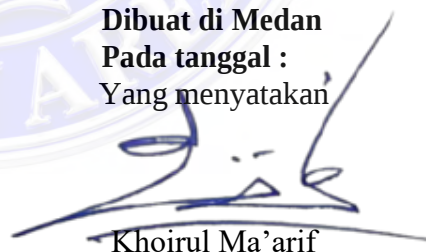
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Khoirul Ma'arif

ABSTRAK

IMPLEMENTASI APLIKASI SIMERAK LANGKAT DALAM PELAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KABUPATEN LANGKAT

Nama : Khoirul Ma'arif
NPM : 231801039
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing II : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi admin perangkat daerah, pejabat pengelola data pembangunan, serta pihak terkait di tingkat kabupaten. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Weimer dan Vining yang mencakup aspek logika kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kemampuan implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIMERAK Langkat telah digunakan sebagai instrumen pelaporan dalam mendukung digitalisasi pembangunan daerah, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Pada aspek logika kebijakan, tujuan jelas dan fungsi aplikasi telah sesuai, namun sistem belum terintegrasi dan belum adaptif. Pada aspek lingkungan kebijakan, dukungan dasar telah tersedia, tetapi belum merata, terutama pada infrastruktur, anggaran, dan regulasi operasional. Pada aspek kemampuan implementor, pelaksanaan didukung oleh kompetensi dasar dan mekanisme koordinasi, meskipun masih terdapat variasi kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia. Hambatan utama implementasi terletak pada belum optimalnya integrasi dan adaptivitas sistem pelaporan, ketidakmerataan dukungan sumber daya, serta variasi kemampuan implementor. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi konsistensi serta kualitas pelaporan antarperangkat daerah. Dengan demikian, implementasi aplikasi SIMERAK Langkat telah berjalan, namun memerlukan penguatan pada aspek sistem, pemerataan sumber daya, serta peningkatan kemampuan implementor secara berkelanjutan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, SIMERAK Langkat, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, APBD, Weimer dan Vining.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE SIMERAK LANGKAT APPLICATION IN REPORTING PHYSICAL AND FINANCIAL REALIZATION OF THE REGIONAL BUDGET IN LANGKAT REGENCY

Name : Khoirul Ma'arif
Student Number : 231801039
Major : Master of Public Administration
1st Advisor : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
2nd Advisor : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

This study aims to analyze the implementation of the SIMERAK Langkat application in reporting the realization of physical and financial aspects of the regional budget (APBD) in Langkat Regency, as well as to identify the inhibiting factors. This study employs a descriptive qualitative approach with purposively selected informants, including local government administrators, development data managers, and relevant stakeholders at the regency level. Data were collected through interviews, documentation, and observation, and analyzed using the model of Miles, Huberman, and Saldaña, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing. The analysis is based on the policy implementation framework proposed by Weimer and Vining, which includes policy logic, policy environment, and implementor capacity. The findings indicate that the SIMERAK Langkat application has been utilized as a reporting instrument to support the digitalization of regional development, although its implementation still faces several limitations. In terms of policy logic, the objectives are clear and the application's functions are aligned with reporting needs; however, the system is not yet integrated and lacks adaptability. Regarding the policy environment, basic support is available but not evenly distributed, particularly in terms of infrastructure, budget allocation, and operational regulations. In terms of implementor capacity, the implementation is supported by basic technical competence and coordination mechanisms, although disparities in capacity and limitations in human resources persist. The main constraints of implementation lie in the lack of system integration and adaptability, uneven distribution of resources, and variations in implementor capacity. These factors are interrelated and affect the consistency and quality of reporting across local government units. Therefore, although the implementation of the SIMERAK Langkat application has been carried out, it requires integrated strengthening in system development, resource distribution, and implementor capacity enhancement to improve reporting performance.

Keywords: policy implementation, SIMERAK Langkat, physical and financial reporting, regional budget, Weimer and Vining.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Alloh SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat” dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari perjuangan panjang, kerja keras, serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara akademik, moral, maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa pascasarjana dalam melaksanakan kegiatan akademik dan penelitian.
2. Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, atas bimbingan, kebijakan, dan perhatian yang telah membantu kelancaran seluruh kegiatan akademik.
3. Dr. Adam, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, atas arahan, motivasi, dan dukungan dalam proses pembelajaran serta pelaksanaan penelitian ini.

4. Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan yang berharga sejak tahap perencanaan hingga penyusunan akhir tesis ini.
5. Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA, selaku Dosen Pembimbing II, atas arahan, saran konseptual, dan dorongan motivatif yang memperkaya substansi ilmiah dan kedalaman analisis penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, atas ilmu, wawasan, dan nilai-nilai keilmuan yang telah ditanamkan selama masa perkuliahan, yang menjadi fondasi berpikir penulis dalam menulis tesis ini.
7. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, atas pelayanan dan bantuan administratif yang memudahkan penulis selama menempuh proses studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa Magister Administrasi Publik angkatan 2023/2024, atas kebersamaan, dukungan moral, serta semangat saling membantu yang sangat berarti selama perjalanan akademik ini.
9. Seluruh informan penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan data, serta berbagi pengalaman dan pandangan berharga dalam proses penelitian ini.
10. Rekan-rekan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, tempat penulis bekerja, atas dukungan, motivasi, serta suasana kerja yang kondusif sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

11. Keluarga tercinta, terutama Ayahanda Alm. Suntono, Ibunda Almh. Ngatini, Istri tercinta Asmelita Purba, SE, serta Anak-anak tersayang Zahra Amelia Ramadhani, Muhammad Nabil Khoirul Anam, Muhammad Za'im Shobri Ma'arif, dan seluruh anggota keluarga besar, atas kasih sayang, do'a, dan dukungan moril maupun materiil yang tiada henti. Mereka adalah sumber kekuatan dan inspirasi utama yang mendorong penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini hingga tuntas.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan berbasis digital di pemerintahan daerah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi peningkatan kualitas sistem pelaporan pembangunan daerah.

Medan, April 2026



Khoirul Ma'arif

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d: 11)

“Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah bentuk pengabdian besar bagi negeri.”

“Teknologi hanyalah alat, niat dan integritas manusialah yang menentukan keberhasilan kebijakan.”



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN MOTTO	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	8
2.2 Konsep Implementasi	9
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	11
2.3.1 Model implementasi kebijakan publik	13
2.3.2 Indikator implementasi kebijakan	14
2.4 Konsep Aplikasi	17
2.5 Konsep SIMERAK Langkat.....	18
2.6 Konsep Pelaporan.....	19
2.7 Konsep Realisasi Fisik dan Keuangan	21
2.8 Konsep APBD	22
2.9 Penelitian Terdahulu	24
2.10 Kerangka Pikir Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian	35
3.2 Fokus Penelitian	35
3.3 Lokasi Penelitian	36
3.4 Instrumen Penelitian.....	36
3.5 Sumber Data Penelitian	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum	46
4.1.1 Sejarah dan profil	46
4.1.2 Visi dan misi.....	46
4.1.3 Struktur birokrasi.....	47
4.1.4 Tugas dan fungsi.....	48
4.1.5 Konteks pelaporan pembangunan dan kebutuhan digitalisasi.....	49

4.1.6	Posisi Bagian Administrasi Pembangunan dalam implementasi SIMERAK Langkat	50
4.1.7	Deskripsi objek penelitian	51
4.1.7.1	Gambaran umum, latar belakang, dan tujuan pengembangan SIMERAK Langkat.....	51
4.1.7.2	Permasalahan pelaporan sebelum implementasi SIMERAK Langkat.....	52
4.1.7.3	Pengembangan dan evolusi aplikasi SIMERAK Langkat	53
4.1.7.4	Fitur utama aplikasi SIMERAK Langkat.....	54
4.1.7.5	Alur operasional aplikasi SIMERAK Langkat.....	58
4.1.8	Ruang lingkup pemanfaatan aplikasi SIMERAK Langkat dalam penelitian	58
4.2	Analisis Data	59
4.2.1	Implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dan faktor penghambatnya dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat.....	59
4.2.1.1	Logika kebijakan	60
4.2.1.2	Lingkungan kebijakan	78
4.2.1.3	Kemampuan implementor	94
4.3	Pembahasan	113
4.3.1	Implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dan faktor penghambatnya dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat.....	113
4.3.1.1	Logika kebijakan	113
4.3.1.2	Lingkungan kebijakan	121
4.3.1.3	Kemampuan implementor	129
4.3.2	Sintesis pembahasan	137
BAB V PENUTUP.....		139
5.1	Kesimpulan.....	139
5.2	Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA		143
LAMPIRAN		147

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Monitoring Penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024.....	4
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir Penelitian	34
Gambar 3.1	Analisis Data Model Miles, Huberman dan Saldana	43
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat	48
Gambar 4.2	Halaman Login Aplikasi SIMERAK Langkat	57
Gambar 4.3	Menu pada Aplikasi SIMERAK Langkat	57
Gambar 4.4	Foto Kegiatan Peluncuran Aplikasi SIMERAK Langkat	63
Gambar 4.5	Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi SIMERAK Langkat.....	72
Gambar 4.6	Foto Kondisi Ketersediaan Perangkat di Kecamatan.....	81
Gambar 4.7	Foto Kegiatan Pelatihan Aplikasi SIMERAK Langkat.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai dasar Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagai aturan pelaksana, dan dirinci lebih lanjut pada tingkat teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Ketiga regulasi tersebut secara berjenjang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah secara tepat waktu, transparan, dan terukur.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mempertegas kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian tersebut dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program serta penilaian dan pelaporan atas hasil pembangunan daerah, dengan salah satu instrumen utamanya berupa monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD. Mekanisme pelaporan tersebut juga berperan dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran daerah di tengah fenomena rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi pada berbagai level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kewajiban ini menuntut pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Langkat, untuk memiliki sistem pelaporan yang mampu menyediakan data pembangunan secara akurat, tepat waktu, dan terkoordinasi, guna merespons tuntutan tata kelola modern

yang semakin mengandalkan informasi real-time dalam proses pengambilan keputusan.

Kabupaten Langkat sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Sumatera Utara dengan karakteristik wilayah yang luas, rentang kendali yang panjang, dan kondisi geografis yang beragam. Penyelenggaraan pembangunan di daerah ini melibatkan 62 perangkat daerah pengguna anggaran dan unit kerja kuasa pengguna anggaran sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Kompleksitas kelembagaan, rentang kendali yang panjang, dan variasi kapasitas teknis antarperangkat daerah menjadikan Kabupaten Langkat sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika implementasi sistem pelaporan berbasis digital.

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan memiliki tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan. Salah satu perwujudan tugas tersebut adalah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat.

Sebelum diterapkannya digitalisasi pelaporan, proses penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan APBD di Kabupaten Langkat masih dilakukan secara manual melalui korespondensi dan dokumen sederhana. Menurut Ma'arif (2016), mekanisme manual tersebut menyebabkan proses pencarian, penyortiran, dan

penyajian data menjadi lambat, kurang efisien, serta rawan ketidaktepatan, terutama karena terbatasnya sumber daya manusia yang menangani pengelolaan pelaporan. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakteraturan penyampaian laporan, format pelaporan yang tidak seragam, serta hambatan geografis pada beberapa perangkat daerah.

Sebagai respons terhadap berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat menetapkan kebijakan digitalisasi pelaporan melalui pengembangan aplikasi SIMERAK Langkat, yang diperkuat melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Nomor 900-20/K/SEKR/2025. Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD secara sistematis dan berbasis teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya, Bagian Administrasi Pembangunan berperan sebagai pengelola utama aplikasi tersebut.

Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIMERAK Langkat masih menghadapi berbagai kendala dalam proses pelaporan. Beberapa perangkat daerah mengalami keterbatasan perangkat teknologi dan akses internet. Kompetensi operator atau admin aplikasi masih bervariasi, ditambah kendala teknis pada aplikasi sumber data menyebabkan kualitas dan ketepatan data yang diinput belum konsisten. Selain itu, pelatihan yang belum berjalan optimal serta keterbatasan anggaran untuk pembaruan sistem turut menghambat upaya peningkatan kapasitas pelaksana dan perbaikan kualitas pelaporan. Tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan pelaporan juga belum optimal, sehingga penyampaian laporan tidak selalu dipenuhi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan tidak

hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, kapasitas pengguna, serta dukungan kelembagaan yang memadai.

Data monitoring pelaporan tiga tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1, memperkuat gambaran tersebut. Penyampaian laporan cenderung rendah pada awal tahun dan baru meningkat menjelang akhir tahun anggaran. Dalam tiga tahun terakhir, tidak ada satu pun perangkat daerah yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan pada bulan Januari hingga Maret secara tepat waktu, sehingga menunjukkan pola keterlambatan yang konsisten. Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan dalam mekanisme pelaporan yang belum sepenuhnya teratasi meskipun digitalisasi telah diterapkan, sehingga diperlukan penelaahan lebih mendalam terhadap proses implementasi serta dukungan sistem yang mendasarinya.

Tabel 1.1 Hasil Monitoring Penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024

No.	Bulan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Sudah Lapor	Belum Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor
1.	Januari	0	62	0	62	0	62
2.	Februari	0	62	0	62	0	62
3.	Maret	0	62	0	62	0	62
4.	April	0	62	33	29	0	62
5.	Mei	1	61	36	26	32	30
6.	Juni	1	61	51	11	50	12
7.	Juli	22	40	57	5	53	9
8.	Agustus	15	47	58	4	56	6
9.	September	14	48	50	12	53	9
10.	Oktober	25	37	46	16	54	8
11.	November	20	42	54	8	56	6
12.	Desember	62	0	62	0	62	0

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat

Berbagai penelitian terdahulu mengenai sistem pelaporan berbasis digital, seperti penelitian Furqonia dkk. (2023) tentang aplikasi E-Kenda di Kabupaten Sidoarjo, penelitian Mamengko (2022) tentang aplikasi EPRA di Kabupaten Minahasa, dan penelitian Bening dkk. (2022) tentang aplikasi e-Monevlap di Kota Bandung, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan pemerintah berpotensi mendorong perbaikan kinerja pelaporan.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji interaksi antara logika kebijakan, lingkungan implementasi, dan kemampuan implementor dalam pelaksanaan kebijakan pelaporan berbasis digital. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah implementasi aplikasi SIMERAK Langkat maupun pelaporan realisasi fisik dan keuangan pada konteks organisasi pemerintah daerah yang besar dan kompleks seperti Kabupaten Langkat, yang melibatkan 62 perangkat daerah dan unit kerja serta didukung data monitoring pelaporan selama tiga tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, baik secara konseptual, empiris, maupun metodologis. Secara konseptual, belum banyak penelitian yang menerapkan kerangka implementasi kebijakan Weimer dan Vining untuk menganalisis implementasi sistem pelaporan digital pemerintah daerah melalui dimensi logika kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kemampuan implementor. Secara empiris, masih terbatas studi yang mengungkap pola keterlambatan pelaporan pada triwulan awal secara konsisten dalam periode tiga tahun sebagaimana terjadi di Kabupaten Langkat. Secara metodologis, penelitian terdahulu juga belum banyak memadukan analisis implementasi kebijakan dengan data monitoring pelaporan aktual secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian

mengenai implementasi aplikasi SIMERAK Langkat penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan pelaporan berbasis digital serta faktor-faktor yang menghambatnya.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, terlihat bahwa implementasi aplikasi SIMERAK Langkat masih menghadapi berbagai kendala yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat dengan menggunakan kerangka teori Weimer dan Vining. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai proses implementasi sistem pelaporan digital, tetapi juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan perbaikan kebijakan pada masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang dirumuskan untuk dijawab melalui proses pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2020). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat?
2. Apa saja faktor yang menghambat implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan yang menunjukkan arah dan hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat;
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan berbasis digital dengan menggunakan kerangka teori Weimer dan Vining, serta memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan berbasis teknologi informasi dalam konteks pemerintah daerah.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat serta para pemangku kepentingan terkait dalam memperbaiki implementasi aplikasi SIMERAK Langkat pada pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Menurut Dye (Prabawati dkk., 2020), kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik dan diikuti oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat melalui tindakan konkret dalam mengatasi masalah publik, mendukung kepentingan masyarakat, mengelola sumber daya, serta menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian penuh pemerintah (Arafat, 2023; Marwiyah, 2022).

Menurut Ravyansah dkk. (2022), kebijakan publik merupakan rangkaian konsep yang diwujudkan melalui perencanaan, implementasi, kepemimpinan, dan tindakan dalam pemerintahan atau organisasi untuk kepentingan umum, yang pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah melalui sistem politik dalam bentuk alokasi nilai di masyarakat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan berdasarkan kewenangan tersebut. Sedangkan menurut Pramono (2020), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat atau dipilih untuk diambil oleh suatu lembaga pemerintah, baik pejabat maupun instansi pemerintah yang merupakan pedoman pegangan ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan dalam kenyataannya.

Sementara itu, Igrisa (2022) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah merupakan suatu rumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, baik berupa

peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pada hakekatnya bersifat mengikat dan mengatur kehidupan suatu organisasi/negara. Hal ini senada dengan pendapat Tahir (2019) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut kepentingan publik yang harus ditaati bersama.

Berbagai definisi yang disampaikan para ahli beragam, akan tetapi ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- 1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah publik;
- 2) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan;
- 3) fungsi pemerintah sebagai layanan publik;
- 4) ada kalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan (Sawir, 2021).

Tujuan utama dari kebijakan publik adalah mewujudkan ketertiban baik dalam suatu wilayah kekuasaan maupun dalam pelaksanaan suatu sistem yang bersifat publik, di mana keberadaan kebijakan tersebut memberikan batasan dan aturan bagi masyarakat secara personal dalam proses implementasinya (Dewi, 2022).

2.2 Konsep Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai menyediakan sarana untuk pelaksanaan sesuatu dan menimbulkan efek atau dampak, yang dalam kehidupan kenegaraan tercermin melalui undang-undang, peraturan, keputusan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang dapat menimbulkan dampak tersebut (Abdal, 2015). Menurut Tahir (2019), implementasi dimaknai sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan. Implementasi sebagai

pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Marwiyah, 2022). Menurut Van Meter dan Van Horn (Kamal, 2016), proses implementasi didefinisikan sebagai “tindakan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”.

Implementasi sebagai salah satu komponen terpenting dalam mewujudkan suatu gagasan merupakan proses penerapan yang harus dilakukan di berbagai bidang tanpa batasan agar tujuan dapat tercapai, sehingga persiapan menyeluruh terhadap seluruh kebutuhan lapangan menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program (Dewi, 2022). Implementasi adalah kegiatan pelaksanaan atas apa yang telah diputuskan dan disepakati sebelumnya, yang memiliki peran sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan publik karena tanpa adanya proses implementasi, kebijakan yang telah ditetapkan hanya akan sia-sia serta tidak dapat berjalan secara baik dan benar (Ravyansah dkk., 2022).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, pejabat pemerintah, maupun pegawai swasta dengan berpedoman pada tujuan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana digariskan dalam kebijakan melalui pelaksanaan tindakan atau kegiatan guna menangani persoalan atau mengubah kondisi menjadi seperti yang diharapkan, yang keseluruhan prosesnya diatur oleh peraturan dan dijalankan oleh sejumlah pelaksana dalam suatu lingkungan tertentu (Subianto, 2020; Sawir, 2021).

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien dan tepat guna demi memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat (Meutia, 2017). Proses ini dirancang untuk memengaruhi sistem dalam mencapai tujuan yang diharapkan, dengan memperhatikan sejumlah indikator seperti efisiensi, ketepatan, ketepatan waktu, pemenuhan kebutuhan, tingkat kepuasan, penggunaan alternatif, koordinasi, pengambilan keputusan, tanggung jawab, serta evaluasi kebijakan, dimana implementasi kebijakan sebagai salah satu mata rantai dalam proses kebijakan yang dilaksanakan setelah perumusan kebijakan memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab tanpa adanya implementasi maka kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan bermakna dalam praktik kebijakan publik (Igirisa, 2022). Hal ini serupa dengan pendapat Abdoellah dan Rusfiana (2016) yang menyatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan, yang keberadaannya sangat penting karena tanpa adanya implementasi, maka kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi sia-sia.

Dalam siklus kebijakan, implementasi kebijakan adalah tahap dimana keputusan kebijakan diubah menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan kebijakan (Arafat, 2023). Untuk mencapai hasil yang diinginkan, implementasi kebijakan mencakup pelaksanaan program, kegiatan, dan tindakan operasional yang didukung oleh proses kompleks berupa perumusan rencana, alokasi sumber daya, koordinasi antarinstansi, komunikasi yang efektif, pelibatan pihak terkait, pengawasan, serta evaluasi, yang keseluruhannya dipengaruhi oleh struktur

organisasi, kapasitas administrasi, ketersediaan sumber daya, dukungan politik, dan dinamika sosial, sehingga pada akhirnya implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas rumusan kebijakan yang disusun guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kamal, 2016). Implementasi kebijakan publik sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik (Kadji, 2015).

Ada dua pilihan Langkah yang dapat dipilih untuk mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan tersebut (Pramono, 2020). Sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan publik sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan dapat menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik (Tahir, 2019).

Agar implementasi kebijakan publik yang ditetapkan dapat efektif, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Tahapan implementasi dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan publik maka kebijakan publik tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain;
- b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai (Pramono, 2020).

2.3.1 Model implementasi kebijakan publik

Semua produk kebijakan apapun itu, pada akhirnya bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Subarsono (2020) menegaskan bahwa banyak faktor yang saling berhubungan yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pandangan Weimer dan Vining (1999) mengemukakan tiga kelompok aspek besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan, yaitu:

- 1) Logika kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang diterapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoritis. Teori apa yang mendasari hubungan antara kebijakan dan hasil yang diinginkan? Apakah teorinya masuk akal? Karakteristik kebijakan, dan keadaan adopsinya, menentukan hipotesis yang mendasari pelaksanaan dan kemungkinan kebenarannya. Kita bisa memikirkan logika suatu kebijakan sebagai rangkaian hipotesis. Agar kebijakan berhasil, hipotesis-hipotesis tersebut harus benar. Semakin besar kemungkinan bahwa hipotesis-hipotesis tersebut salah, maka semakin kecil juga kemungkinan kebijakan tersebut akan berhasil. Singkatnya, sebuah kebijakan kemungkinan besar tidak dapat diimplementasikan jika secara intrinsik kita tidak dapat menentukan rangkaian perilaku logis yang mengarah pada hasil yang diinginkan.
- 2) Lingkungan kebijakan. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu

daerah, bisa saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda lingkungannya.

- 3) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. Dalam penelitian ini, istilah kemampuan implementor sebagaimana dikemukakan oleh Weimer dan Vining digunakan sebagai konsep utama. Istilah ini secara konseptual sejalan dengan pengertian kapasitas pelaksana kebijakan.

Tiga kelompok aspek diatas harus senantiasa menjadi fokus perhatian dari pengambil kebijakan.

Terdapat berbagai pendapat dari ahli yang mengemukakan teori tentang implementasi kebijakan, namun teori yang dikemukakan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining mengenai tiga kelompok aspek yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dianggap merupakan teori yang tepat dalam penelitian ini. Teori tersebut dipilih karena tiga kelompok aspek utama yang dikemukakan oleh Weimer dan Vining dianggap sebagai aspek fundamental yang relevan dengan permasalahan pada implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat, di mana ketiga aspek tersebut bersifat sederhana namun sekaligus merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap proses implementasi kebijakan.

2.3.2 Indikator implementasi kebijakan

Berdasarkan kerangka implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining, tiga aspek utama implementasi kebijakan, yaitu logika kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kemampuan implementor, perlu

dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang bersifat operasional. Penjabaran ini bertujuan untuk mempermudah analisis empiris terhadap implementasi kebijakan, dengan tetap mengacu pada konsep teoritis yang relevan.

Indikator-indikator operasional dalam penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik implementasi kebijakan berbasis sistem informasi pemerintahan, serta didukung oleh literatur implementasi kebijakan, yang menekankan pentingnya keterkaitan antara aspek kebijakan, lingkungan, dan kemampuan implementor dalam menentukan keberhasilan implementasi.

1. Logika Kebijakan

Aspek logika kebijakan berkaitan dengan rasionalitas desain kebijakan serta hubungan antara kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai (Weimer dan Vining, 1999). Indikator pada aspek ini meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, merujuk pada sejauh mana tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas, spesifik, dan dapat dipahami oleh pelaksana sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Kesesuaian fungsi dengan kebutuhan, menunjukkan tingkat relevansi antara desain kebijakan atau sistem dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga kebijakan dapat diterapkan secara optimal.
- c. Kemudahan pemahaman dan penggunaan, mengacu pada sejauh mana kebijakan atau sistem dapat dipahami dan dijalankan oleh pelaksana tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti.
- d. Integrasi dengan sistem dan kebijakan lain, menunjukkan keterkaitan kebijakan dengan sistem atau kebijakan lain, sehingga mendukung efisiensi pelaksanaan serta menghindari duplikasi proses.

2. Lingkungan Kebijakan

Aspek lingkungan kebijakan berkaitan dengan kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik dari sisi organisasi maupun konteks sosial dan kelembagaan (Weimer dan Vining, 1999). Indikator pada aspek ini meliputi:

- a. Infrastruktur teknologi, mencakup ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti jaringan internet, perangkat, dan sistem teknologi yang menunjang implementasi kebijakan.
- b. Ketersediaan anggaran, merujuk pada dukungan pembiayaan yang memadai untuk operasional kebijakan, termasuk pengembangan sistem dan peningkatan kapasitas pelaksana.
- c. Dukungan pimpinan dan stakeholder, mencerminkan komitmen dan keterlibatan aktor kunci dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.
- d. Regulasi dan kebijakan pendukung, menunjukkan adanya aturan yang jelas dan operasional sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, sehingga memberikan kepastian dalam implementasi.

3. Kemampuan Implementor

Aspek kemampuan implementor merujuk pada kemampuan dan kesiapan aparatur dalam melaksanakan kebijakan (Weimer dan Vining, 1999). Dalam penelitian ini, kemampuan implementor dipahami mencakup kapasitas pelaksana dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator pada aspek ini meliputi:

- a. Kompetensi pelaksana, mengacu pada pengetahuan dan keterampilan teknis yang dimiliki oleh pelaksana dalam menjalankan kebijakan.
- b. Ketersediaan sumber daya manusia, berkaitan dengan kecukupan jumlah personel yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Komitmen dan motivasi pelaksana, mencerminkan tingkat kesungguhan, tanggung jawab, dan kedisiplinan pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara konsisten.
- d. Koordinasi dan komunikasi, menunjukkan tingkat keterpaduan interaksi antar pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sehingga dapat mendukung kelancaran implementasi.

2.4 Konsep Aplikasi

Menurut Hastuti dkk. (2024), aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas atau memberikan layanan tertentu secara efisien, dapat berjalan di berbagai platform seperti komputer dan ponsel, berfungsi mendukung aktivitas pribadi, bisnis, atau operasional dengan tujuan memecahkan masalah atau meningkatkan produktivitas, serta bervariasi dalam hal kompleksitas dari yang sederhana hingga yang kompleks untuk kebutuhan profesional.

Dalam konteks pembangunan, aplikasi sering kali merujuk pada perangkat lunak yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan. Aplikasi ini dapat mencakup sistem informasi manajemen pembangunan, alat analisis data, serta platform komunikasi dan kolaborasi. Dengan memanfaatkan aplikasi dan teknologi informasi secara optimal, pemerintah dapat

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

2.5 Konsep SIMERAK Langkat

Menurut Ma'arif (2016), SIMERAK Langkat merupakan singkatan dari Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kabupaten Langkat, yaitu sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam konteks pengelolaan pembangunan daerah, SIMERAK Langkat digunakan sebagai instrumen pelaporan yang memfasilitasi penyajian informasi realisasi keuangan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.

Secara konseptual, SIMERAK Langkat berfungsi sebagai instrumen manajerial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya untuk mendukung pengendalian program dan kegiatan pembangunan. Sistem ini memuat informasi terkait realisasi keuangan, capaian fisik kegiatan, tingkat serapan anggaran, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui pemanfaatan SIMERAK Langkat, pemerintah daerah dapat melihat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, baik dari aspek keuangan maupun fisik, sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan secara periodik.

Penerapan SIMERAK Langkat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pelaporan realisasi APBD, terutama dari sisi ketepatan waktu penyampaian laporan, keakuratan data, serta keteraturan proses pengelolaan laporan dari perangkat daerah. Selain itu, sistem ini juga mendukung kemudahan pengaksesan dan penyajian data realisasi anggaran dan kinerja

pembangunan daerah, sehingga diharapkan dapat memperkuat proses pengendalian pembangunan serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

2.6 Konsep Pelaporan

Menurut Gulick dkk. (1937), pelaporan adalah fungsi manajemen yang melibatkan penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan, serta informasi terkait tugas dan fungsi kepada atasan, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sehingga penerima laporan dapat memahami pelaksanaan tugas dari pihak yang melaporkan sehingga membantu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Siagian (2003) mengisyaratkan bahwasanya pelaporan merupakan kegiatan menghimpun, mencatat, dan menyampaikan informasi tentang pelaksanaan suatu aktivitas kepada pihak yang memiliki kewenangan atau kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 menegaskan bahwa pelaporan merupakan kegiatan penting dalam proses pembangunan untuk menyajikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang sesuai dengan kondisi aktual. Pelaporan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang, serta harus disampaikan kepada masyarakat baik secara aktif, melalui penyebaran informasi oleh setiap unit organisasi menggunakan media cetak atau elektronik, maupun secara pasif melalui pengembangan situs informasi yang dapat diakses publik. Agar pelaporan mampu memberikan informasi maksimal, diperlukan format laporan yang memadai, yaitu yang mampu memuat informasi yang relevan

sehingga dapat menjadi acuan dalam tindakan korektif maupun perumusan perencanaan pada periode selanjutnya.

Pelaporan pembangunan memiliki tujuan utama, antara lain: 1) menyajikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan; 2) memberikan akuntabilitas publik melalui penyampaian hasil pembangunan kepada masyarakat secara aktif maupun pasif; 3) menjadi dasar evaluasi dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan program atau kegiatan; serta 4) menyediakan data relevan sebagai acuan perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Proses pelaporan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) pengumpulan data dan informasi dari unit pelaksana kegiatan; 2) pengolahan dan penyusunan laporan dalam format yang memadai dan terukur; 3) penyampaian laporan secara berjenjang dari pelaksana ke pimpinan unit hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi; 4) publikasi laporan kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, maupun situs informasi publik; dan 5) pemanfaatan laporan sebagai dasar evaluasi, koreksi kebijakan, serta perencanaan pembangunan selanjutnya.

Dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang sering muncul, antara lain: 1) keterbatasan kualitas data yang sering kali tidak lengkap, akurat, atau mutakhir; 2) kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengolahan dan analisis data; 3) format laporan yang belum seragam sehingga menyulitkan konsolidasi; 4) keterlambatan penyampaian laporan akibat prosedur birokratis maupun lemahnya koordinasi antar unit; 5) pemanfaatan laporan yang masih minim karena dipandang sebatas kewajiban administratif; 6) keterbatasan sarana dan

prasarana teknologi informasi, khususnya di daerah; serta 7) rendahnya transparansi yang membuat laporan belum sepenuhnya mudah diakses masyarakat luas.

2.7 Konsep Realisasi Fisik dan Keuangan

Menurut Zalmi dan Eliza (2025), realisasi fisik mencerminkan pencapaian kegiatan sesuai target, sedangkan realisasi keuangan menunjukkan persentase penggunaan anggaran dari total alokasi yang tersedia. Dalam konteks pembangunan daerah, realisasi fisik menunjukkan pencapaian output berupa hasil nyata program, sedangkan realisasi keuangan mencerminkan persentase dana yang telah dibelanjakan dari total anggaran. Keseimbangan keduanya merupakan faktor penting untuk memastikan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan. Efektivitas realisasi fisik dan keuangan adalah indikator utama keberhasilan pengelolaan anggaran daerah yang merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Capaian realisasi fisik dan keuangan di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia bervariasi, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1) kapasitas manajerial pemerintah daerah, khususnya kemampuan SDM dalam pengelolaan anggaran; 2) kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan anggaran; 3) tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan; serta 4) kondisi infrastruktur dan geografis yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan program pembangunan. Meskipun banyak daerah mencapai realisasi yang tinggi, implementasi anggaran masih menghadapi tantangan, seperti: 1) penyerapan anggaran yang tidak merata akibat lambatnya proses administrasi dan birokrasi; 2) ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan karena perencanaan yang kurang matang; serta 3) masalah transparansi

dan akuntabilitas akibat kurang akuratnya pelaporan dan lemahnya pengawasan, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran.

Menurut Permadi (2018), laporan realisasi fisik dan keuangan merupakan instrumen penting yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja perangkat daerah, sehingga keberadaannya memiliki peran yang strategis dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan, khususnya pada realisasi fisik adalah menyamakan perhitungan realisasi fisik dengan realisasi keuangan. Hal ini tidak tepat karena realisasi keuangan didasarkan pada pertanggungjawaban keuangan yang hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode yang sama, keberadaan realisasi keuangan selalu menunjukkan adanya realisasi fisik, tetapi realisasi fisik belum tentu disertai dengan realisasi keuangan. Beberapa aspek krusial dalam penyusunan realisasi fisik beserta justifikasinya meliputi tersedianya rencana dan jadwal kegiatan yang jelas serta kelengkapan berkas pendukung. Apabila kedua hal tersebut terpenuhi, proses justifikasi terhadap besaran realisasi fisik dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat.

2.8 Konsep APBD

Menurut Renyowijoyo (Mamengko, 2022), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dijelaskan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD

memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan melalui enam fungsi utama, yaitu: 1) Fungsi otorisasi, di mana APBD menjadi dasar hukum pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran, sehingga setiap kegiatan di luar APBD tidak memiliki legitimasi; 2) Fungsi perencanaan, di mana APBD berfungsi sebagai pedoman dalam mengalokasikan dana untuk program dan proyek pembangunan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai; 3) Fungsi pengawasan, di mana APBD digunakan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan, serta menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan; 4) Fungsi alokasi, di mana APBD mengarahkan distribusi dana untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan efisiensi perekonomian daerah; 5) Fungsi distribusi, di mana APBD menjamin pemerataan alokasi sumber daya antar sektor dan wilayah untuk menjaga keadilan sosial; 6) Fungsi stabilisasi, di mana APBD berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah melalui pengaturan pendapatan dan belanja guna mengatasi fluktuasi ekonomi.

APBD terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait dan bertujuan menyampaikan rencana keuangan Pemerintah Daerah secara rinci, yaitu: 1) Pendapatan Daerah, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi, Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, serta pendapatan sah lainnya; 2) Belanja Daerah, digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan, termasuk belanja pegawai, barang/jasa, dan belanja modal; 3) Pembiayaan Daerah, mencakup penerimaan dan pengeluaran yang harus dibayar kembali untuk menutup selisih pendapatan dan belanja jika terjadi defisit.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk memperkaya landasan teori serta mengkaji studi serupa, sehingga persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Muhammad Fajri Zalmi, Rivdya Eliza; dengan judul “Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah di Sumatera Barat”; tahun 2025; dari Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 15, Nomor 1. Penelitian ini membahas tentang bagaimana ketercapaian realisasi fisik dan keuangan di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teori yang digunakan adalah teori manajemen pembangunan daerah dan konsep pengendalian anggaran publik dari Mardiasmo. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, sedangkan pengumpulan datanya melalui dokumentasi, wawancara terstruktur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, realisasi fisik dan keuangan cukup baik, namun terdapat variasi antar kabupaten/kota akibat perbedaan faktor internal seperti kapasitas manajerial, efisiensi perencanaan, koordinasi, birokrasi, dan dukungan sumber daya. Keberhasilan realisasi sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, pengawasan yang efektif, dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pembangunan.
2. Penelitian dari Andi Mirnawati, Amir Imbaruddin, Najmi Kamariah; dengan judul “Monitoring Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran di UPT

RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan”; tahun 2024; diperoleh dari Jurnal Dunia Kesmas, Volume 13, Nomor 4. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan monitoring pelaporan realisasi fisik dan keuangan anggaran di UPT RSUD Sayang Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan merujuk pada konsep pengendalian anggaran publik dan manajemen keuangan sektor publik dari Halim. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, sedangkan pengumpulan datanya melalui observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan realisasi fisik dan keuangan masih belum optimal jika dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, ketepatan waktu pelaporan dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dikelola, beban kerja, ketersediaan sarana prasarana, dan kualitas SDM. Kedua, ketepatan penyerapan anggaran bergantung pada proses pengesahan, perencanaan penyerapan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Ketiga, tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan menghadirkan inovasi sistem yang memudahkan proses pelaporan.

3. Penelitian dari Fadillah Nuzul Furqonia, Susi Ratnawati, Tri Prasetyowati; dengan judul “Implementasi Aplikasi E-Kenda Sebagai Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”; tahun 2023; diperoleh dari Jurnal Publiciana, Volume 16, Nomor 02. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi aplikasi E-Kenda pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan dari Edwards III. Pemilihan informan

menggunakan purposive sampling dengan pengumpulan datanya melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi E-Kenda berperan sebagai sistem pengendalian pembangunan daerah yang mendukung instansi terkait dalam proses pelaporan melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan utama pelaksanaannya terletak pada koordinasi antar lembaga saat aplikasi mengalami kendala, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Meski demikian, penerapan E-Kenda memberikan dampak positif berupa meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal.

4. Penelitian dari Merlyn Delly Rumondor, Jantje J. Tinangon, Heince R. N. Wokas; dengan judul “Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Belanja Daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara”; tahun 2023; diperoleh dari Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, Volume 14, Nomor 1. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan di BKAD Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan pengumpulan datanya melalui wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, namun masih terkendala komunikasi dengan pusat, keterbatasan jaringan, serta fitur aplikasi yang belum sempurna. Upaya perbaikan dilakukan melalui

peningkatan bandwidth, penyediaan server, dan koordinasi intensif dengan pengembang pusat.

5. Penelitian dari Dian Natalia Mamengko; dengan judul “Pelaporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) di Kabupaten Minahasa”; tahun 2022; diperoleh dari SIBATIK Journal, Volume 2, Nomor 1. Penelitian ini membahas pengelolaan pelaporan realisasi anggaran melalui aplikasi EPRA sebagai sarana evaluasi dan pengawasan anggaran di Kabupaten Minahasa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi publik dan akuntansi sektor publik (Mardiasmo, Bastian, Renyowijoyo). Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, sedangkan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan pelaporan melalui aplikasi EPRA sesuai mekanisme dan mendukung pengawasan, meskipun terkendala oleh keterbatasan SDM dan penguasaan teknologi informasi.
6. Penelitian dari Pelangi Bening, Elisa Susanti, Rd Ahmad Buchari; dengan judul “Inovasi Kebijakan E-Monevlap (Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) pada Bagian Program Desain Kualitas dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung”; tahun 2022; diperoleh dari Jurnal Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan inovasi kebijakan e-Monevlap pada Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori inovasi kebijakan *A Framework for Analyzing the*

Implementation of Innovation yang dikemukakan oleh Steelman. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis data berdasarkan model Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Monevlap belum optimal. Hambatan utama terdapat pada SDM OPD yang belum maksimal menginput data secara akurat dan realtime; struktur yang masih menggunakan SOP lama tanpa regulasi khusus; serta budaya organisasi yang belum mendukung, ditandai rendahnya komitmen OPD dalam melaporkan progres dan kendala.

7. Penelitian dari Bagus Pati, Komang Jaka Ferdian, Bustami Rahman; dengan judul “Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi terhadap Aplikasi SMART IN PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka”; tahun 2022; diperoleh dari Jurnal Trias Politika, Volume 6, Nomor 2. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik berbasis e-Government melalui Aplikasi SMART IN PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk mempercepat penerbitan sertifikat PIRT bagi UMKM. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menekankan pada aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, sedangkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan inovasi SMART IN PIRT dinilai efektif karena mempercepat proses perizinan dari 6 bulan menjadi 4-5 hari,

memberikan dampak positif bagi UMKM, meskipun masih dipengaruhi oleh regulasi pusat-daerah dan keterbatasan sumber daya.

8. Penelitian dari Marvia Swesty; dengan judul “Implementasi Kebijakan Publik Berbasis Digital di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017–2019”; tahun 2020; diperoleh dari Jurnal JOM FISIP Volume 7, Edisi II. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis digital di Kecamatan Bukit Raya melalui aplikasi SIPADU dan E-Sapa Warga sebagai inovasi pelayanan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan digital telah berjalan sejak 2017 dan memberi dampak positif terhadap efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Namun implementasi belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, masalah jaringan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat khususnya lanjut usia terhadap penggunaan aplikasi digital.
9. Penelitian dari Herfina Tedjo Warsito; dengan judul “Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya”; tahun 2016; diperoleh dari Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 4, Nomor 2. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan program E-Kios di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan dari Edwards III. Teknik

penentuan informan menggunakan purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program E-Kios di Kelurahan Kebraon masih belum optimal karena kurang maksimalnya pelaksanaan faktor disposisi dan komunikasi, sehingga memerlukan perhatian serta perbaikan dari pihak kelurahan dan perangkat daerah terkait.

10. Penelitian dari Muhammad Nasrullah; dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di Universitas Negeri Makassar”; tahun 2015; diperoleh dari Jurnal Administrasi Publik, Volume 5, Nomor 1. Penelitian ini membahas implementasi sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di Universitas Negeri Makassar dengan meninjau aspek komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang dianalisis melalui tiga aspek utama. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, terdiri dari pimpinan universitas, dosen, pegawai, dan mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen belum berjalan efektif karena keterbatasan komunikasi antar unit, kekurangan sumber daya manusia profesional serta keterbatasan anggaran, dan adanya resistensi pelaksana yang mengakibatkan kinerja layanan serta jaringan kurang optimal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai posisi penelitian ini di antara berbagai penelitian terdahulu, berikut disajikan perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang. Perbandingan ini mencakup kesamaan topik, serta perbedaan atau kebaruan yang dihasilkan oleh penelitian mengenai implementasi aplikasi SIMERAK Langkat.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, Tahun	Persamaan dengan Penelitian Sekarang	Perbedaan/ Kebaruan Penelitian Sekarang
1.	Muhammad Fajri Zalmi, Rivdya Eliza; Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah di Sumatera Barat; 2025.	Sama-sama fokus pada realisasi fisik dan keuangan pembangunan daerah.	Penelitian SIMERAK Langkat berfokus pada implementasi aplikasi digital (e-reporting) dan koordinasi antar-OPD, bukan sekadar analisis capaian realisasi.
2.	Andi Mirnawati, Amir Imbaruddin, Najmi Kamariah; Monitoring Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran di UPT RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan; 2024.	Sama-sama membahas pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta hambatan SDM dan sarana.	Penelitian SIMERAK Langkat menitikberatkan pada sistem aplikasi daerah berbasis kebijakan publik, bukan monitoring internal unit teknis.
3.	Fadillah Nuzul Furqonia, Susi Ratnawati, Tri Prasetyowati; Implementasi Aplikasi E-Kenda Sebagai Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; 2023.	Sama-sama membahas aplikasi pengendalian pembangunan daerah.	Penelitian SIMERAK Langkat menambahkan analisis berdasarkan teori Weimer dan Vining serta menyoroti koordinasi antar-perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
4.	Merlyn Delly Rumondor, Jantje J. Tinangon, Heinze R. N. Wokas; Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Belanja Daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara; 2023.	Sama-sama membahas penerapan aplikasi digital dalam pengelolaan keuangan publik.	Penelitian SIMERAK Langkat mengkaji pelaporan realisasi fisik dan keuangan lintas-perangkat daerah, bukan hanya pengelolaan internal keuangan daerah.
5.	Dian Natalia Mamengko; Pelaporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) di Kabupaten Minahasa; 2022.	Sama-sama meneliti aplikasi pelaporan realisasi keuangan daerah dan faktor hambatan SDM.	Penelitian SIMERAK Langkat menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan (Weimer dan Vining), bukan pendekatan administrasi publik umum.

No	Penulis, Judul, Tahun	Persamaan dengan Penelitian Sekarang	Perbedaan/ Kebaruan Penelitian Sekarang
6.	Pelangi Bening, Elisa Susanti, Rd Ahmad Buchari; Inovasi Kebijakan E-Monevlap pada Bagian Program Desain Kualitas dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung; 2022.	Sama-sama meneliti inovasi digital dalam pelaporan pembangunan daerah.	Penelitian SIMERAK Langkat menambahkan analisis faktor logika kebijakan dan kemampuan implementor di daerah, dengan konteks aplikasi SIMERAK Langkat.
7.	Bagas Pati, Komang Jaka Ferdian, Bustami Rahman; Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi terhadap Aplikasi SMART IN PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka; 2022.	Sama-sama meneliti kebijakan inovasi berbasis e-Government.	Penelitian SIMERAK Langkat berfokus pada pelaporan pembangunan daerah, bukan layanan publik, dan menggunakan teori berbeda (Weimer dan Vining).
8.	Marvia Swesty; Implementasi Kebijakan Publik Berbasis Digital di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017–2019; 2020.	Sama-sama meneliti implementasi kebijakan berbasis digital pada instansi pemerintah daerah, serta tantangannya.	Penelitian SIMERAK Langkat lebih spesifik menganalisis sistem e-reporting APBD, menggunakan teori berbeda yaitu Weimer dan Vining.
9.	Herfina Tedjo Warsito; Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya; 2016.	Sama-sama meneliti implementasi aplikasi digital di pemerintahan daerah.	Penelitian SIMERAK Langkat menekankan dimensi kebijakan dan koordinasi lintas perangkat daerah pada tingkat kabupaten, bukan unit kelurahan.
10.	Muhammad Nasrullah; Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis TI di Universitas Negeri Makassar; 2015.	Sama-sama meneliti penerapan sistem digital dan hambatan SDM serta infrastruktur.	Penelitian SIMERAK Langkat berfokus pada kebijakan publik daerah (APBD) dan pelaporan kinerja pembangunan, bukan institusi pendidikan.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian terdahulu, yaitu terkait implementasi kebijakan digital dan sistem informasi di sektor publik. Namun penelitian mengenai aplikasi SIMERAK Langkat menghadirkan kebaruan empiris dan konseptual, karena berfokus pada pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD serta menggunakan kerangka teori Weimer dan Vining untuk menganalisis keterpaduan antara kebijakan, lingkungan implementasi, dan kemampuan pelaksana.

2.10 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian merupakan alur pemikiran yang disusun secara logis dan konseptual untuk mengaitkan permasalahan penelitian dengan teori yang digunakan, sekaligus menjadi pedoman dalam menentukan fokus analisis dan data yang relevan (Iba dan Wardhana, 2023). Dalam penelitian ini, kerangka pikir digunakan untuk menghubungkan permasalahan implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dengan teori implementasi kebijakan sebagai landasan analisis.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan pelaporan pembangunan daerah, yang secara operasional dibatasi pada pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD melalui aplikasi SIMERAK Langkat, diimplementasikan oleh perangkat daerah di Kabupaten Langkat, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Untuk memahami dinamika implementasi tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining. Teori ini memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu logika kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kemampuan implementor.

Ketiga dimensi teori Weimer dan Vining tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat. Melalui kerangka pikir ini, implementasi aplikasi SIMERAK Langkat ditempatkan sebagai objek kajian yang dianalisis untuk memperoleh gambaran pelaksanaan implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya. Adapun kerangka pikir penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Dengan menggunakan kerangka pikir tersebut, penelitian ini berupaya memahami keterkaitan antara desain kebijakan, kondisi lingkungan pelaksanaan, dan kemampuan implementor dalam praktik implementasi aplikasi SIMERAK Langkat. Kerangka ini digunakan sebagai pijakan konseptual untuk menuntun proses pengumpulan data dan analisis pada Bab IV. Selanjutnya, penjabaran operasional dari ketiga dimensi tersebut disajikan lebih lanjut pada Bab III sebagai fokus dan indikator penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik melalui pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang diuraikan dalam bentuk narasi sehingga menekankan makna dibandingkan generalisasi (Fiantika dkk., 2022). Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan gejala, fenomena, atau realitas sosial secara sistematis sesuai fokus kajian, tanpa dimaksudkan untuk menguji hubungan antarvariabel (Samsu, 2021). Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat. Penentuan aspek dan indikator penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan dari David L. Weimer dan Aidan R. Vining yang mencakup tiga aspek utama, yaitu logika kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kemampuan implementor.

Indikator-indikator penelitian merupakan penjabaran operasional dari konsep yang telah diuraikan pada Bab II, yang digunakan untuk mengamati dan menganalisis implementasi aplikasi SIMERAK Langkat, sebagai berikut:

1. Logika Kebijakan: kejelasan tujuan, kesesuaian fungsi dengan kebutuhan, kemudahan pemahaman dan penggunaan, integrasi dengan sistem dan kebijakan lain.
2. Lingkungan Kebijakan: infrastruktur teknologi, ketersediaan anggaran, dukungan pimpinan dan stakeholder, regulasi dan kebijakan pendukung.
3. Kemampuan Implementor: kompetensi pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia, komitmen dan motivasi pelaksana, koordinasi dan komunikasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, dengan lokus penelitian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 1, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pengelola dan koordinator pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD melalui aplikasi SIMERAK Langkat. Selain itu, observasi awal menunjukkan adanya dinamika implementasi kebijakan pelaporan berbasis aplikasi digital yang relevan untuk dikaji lebih mendalam.

3.4 Instrumen Penelitian

Secara prinsip, penelitian memerlukan instrumen untuk membantu proses pengumpulan data. Menurut Purwanto (2018), instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian, oleh karena itu keberadaan peneliti sangat penting. Peneliti harus memiliki keterlibatan serta pemahaman mendalam terhadap permasalahan dan subjek penelitian (Siyoto dan Sodik, 2015). Subjek

penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber informasi terkait situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan informan, dimana kehadirannya diharapkan memberikan informasi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan sedetail mungkin tentang hal yang ingin diketahui mengenai objek penelitian (Suyitno, 2018).

Informan dalam penelitian kualitatif dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: 1) Informan kunci, yaitu informan yang memiliki informasi dan gambaran umum atau menyeluruh terkait masalah penelitian, 2) Informan utama, yaitu orang yang bertindak seperti 'aktor utama', yang memiliki informasi mendetail terkait permasalahan penelitian, dan 3) Informan tambahan, yaitu informan yang memberi informasi pelengkap yang relevan dan berguna bagi penelitian (Heryana, 2018). Menurut Sugiyono (2020), informan kunci harus merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Informan ditentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi/kondisi sosial yang akan dikaji dalam fokus penelitian. Dengan demikian, penentuan subjek penelitian yang tepat adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu atau seleksi khusus.

Kriteria subjek penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian adalah: 1) Mengetahui tentang implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat; 2) Terlibat dalam implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat; dan/atau 3) Menerima pelayanan atau memiliki pengalaman terkait implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam

pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, yang dipilih menjadi informan adalah:

1. Informan kunci, yaitu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat berjumlah 1 orang.
2. Informan utama, yaitu Pejabat Fungsional Tertentu Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat berjumlah 2 orang, dan Staf pada Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat berjumlah 1 orang.
3. Informan tambahan, yaitu personel yang menangani pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD melalui aplikasi SIMERAK Langkat atau admin aplikasi SIMERAK Langkat dari 9 perangkat daerah yang dianggap mewakili seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat berjumlah 9 orang, yaitu: dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Kesehatan; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Kecamatan Pematang Jaya; Kecamatan Hinai; dan Kecamatan Sirapit.

3.5 Sumber Data Penelitian

Data merupakan fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti melalui berbagai teknik dari berbagai sumber untuk tujuan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian (Siyoto dan Sodik, 2015). Sumber data mengarah pada benda, hal, atau individu yang menjadi subjek pengamatan, pembacaan, atau pertanyaan oleh peneliti. Sumber data juga merujuk pada jenis informasi yang didapatkan peneliti melalui subjek penelitiannya, dan dari mana data berasal.

(Samsu, 2021). Menurut Sugiyono (2020), terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber primer yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti, dan sumber sekunder yang menyajikan data secara tidak langsung, misalnya melalui pihak ketiga atau dokumen. Sumber data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara dengan informan, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebagai data pelengkap, termasuk dokumen, foto, buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait lainnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara, dokumentasi, dan observasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat terutama pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.

1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga makna dalam suatu topik tertentu dapat dikonstruksikan (Sugiyono, 2020). Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data di tangan pertama (primer), serta sebagai pelengkap dan penguji hasil pengumpulan data lainnya (Hardani dkk., 2020). Terdapat tiga jenis pedoman wawancara yang umum digunakan dalam penelitian, yaitu pedoman wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Pedoman wawancara terstruktur berisi daftar pertanyaan yang telah ditulis secara sistematis menyerupai *check-list*,

dengan pilihan jawaban yang sudah tersedia. Pedoman wawancara tidak terstruktur mencakup poin-poin informasi yang ingin dieksplorasi tanpa format pertanyaan yang tetap, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam menggali data. Sementara itu, pedoman wawancara semi terstruktur atau dikenal sebagai *in-depth interview*, menawarkan format yang lebih terbuka dan fleksibel. Wawancara ini diawali dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan dilanjutkan dengan eksplorasi lebih dalam untuk memperoleh informasi yang lebih mendetail.

Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel dan terbuka, menggunakan format terstruktur namun tidak kaku, serta berlangsung dalam suasana informal dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended questions*). Penggunaan pedoman wawancara semi terstruktur bertujuan agar proses wawancara tetap luwes dan fleksibel, namun tetap terfokus pada data yang ingin diperoleh. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan berbagai peralatan seperti alat perekam, buku catatan, serta daftar pertanyaan yang telah dirancang untuk mengarahkan diskusi dan menghindari pembicaraan yang meluas. Selama wawancara, peneliti mencatat jawaban informan secara langsung dan apa adanya tentang implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat. Wawancara dilakukan kepada informan penelitian yang telah ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.4. Informan tersebut terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yang dipilih berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman dalam implementasi aplikasi SIMERAK Langkat.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan berbagai dokumen dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian ditelaah untuk menilai keabsahan serta membuktikan terjadinya suatu peristiwa (Nasution, 2023). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020). Dokumentasi bukanlah sekadar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen, akan tetapi yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen tersebut (Purwanto, 2018). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, peraturan perundang-undangan, serta data yang berkaitan dengan implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat. Selain itu, informasi juga diperoleh dari internet, unggahan di website resmi Pemerintah Kabupaten Langkat, artikel, berita, foto dan dokumen pendukung terkait lainnya.

3) Observasi

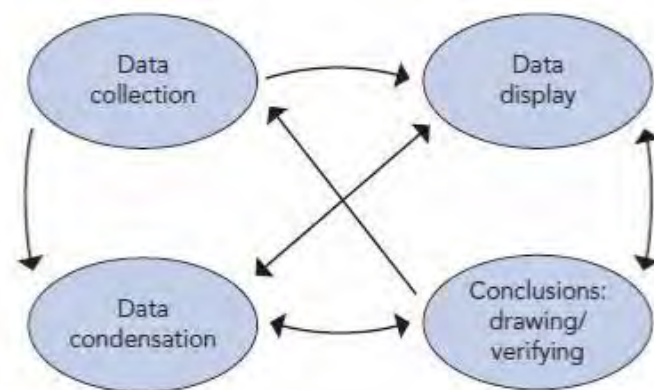
Observasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, yang dilanjutkan dengan pembuatan laporan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata dan rinci mengenai suatu peristiwa atau objek yang diteliti (Fiantika dkk., 2022). Dalam penelitian ini diterapkan observasi partisipan dimana peneliti terlibat atau turut bergabung ke dalam komunitas yang diteliti. Observasi dilakukan dalam kondisi alami tanpa pengkondisian khusus

untuk tujuan penelitian. Selama melakukan pengamatan, peneliti ikut terlibat dalam aktivitas yang dijalankan oleh sumber data, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, akurat, dan mampu mengungkap makna di balik setiap perilaku yang terlihat. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki mengenai implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menelusuri dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi, melalui pengelompokan ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih elemen penting untuk dikaji, serta menarik kesimpulan agar dapat dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lainnya (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana. Menurut Miles dkk. (2014), analisis data kualitatif merupakan proses interaktif dan siklikal yang melibatkan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan, yang berlangsung sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Ketiga aliran ini terus berulang secara paralel, sehingga analisis bersifat berkelanjutan dan iteratif. Interaksi antar aktivitas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles, Huberman dan Saldana

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, atau kombinasi ketiganya, dalam jangka waktu yang cukup lama, memungkinkan diperolehnya data yang banyak dan bervariasi, dan pada tahap awal peneliti melakukan eksplorasi umum dan mencatat secara rinci setiap hal yang diamati, sehingga menghasilkan data yang kaya dan beragam (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai fokus kajian yaitu implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat.

2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan tahapan analisis yang mencakup pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan/atau transformasi terhadap data yang bersumber dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, maupun bahan empiris lainnya dengan tujuan memperkuat data melalui penajaman, penyaringan, pemfokusan, serta pembuangan data yang tidak relevan, kemudian mengorganisasikannya secara terstruktur sehingga memungkinkan penarikan serta

verifikasi kesimpulan secara lebih akurat (Miles dkk., 2014). Kondensasi data dilaksanakan secara berkesinambungan sepanjang keseluruhan tahapan penelitian kualitatif, bahkan sebelum proses pengumpulan data. Sejalan dengan pengumpulan data, muncul juga tahapan kondensasi data lainnya, seperti penyusunan ringkasan, pemberian kode, pengembangan tema, pembentukan kategori, serta penulisan memo analitis, yang berlanjut setelah kegiatan lapangan selesai hingga tersusunnya laporan akhir penelitian (Fiantika dkk., 2022).

Pada penelitian ini, pengumpulan dan kondensasi data dilakukan secara simultan dengan cara memilih, menyeleksi, serta menyaring data primer yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi di kantor Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat kemudian dikondensasi untuk mengekstrak inti informasi yang diperlukan.

3) Penyajian Data (*Data display*)

Setelah melalui proses kondensasi data, langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan atau menyajikan data agar lebih jelas terlihat dan mudah dipahami. Secara umum, penyajian data merupakan bentuk pengorganisasian dan pemadatan informasi yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan (Miles dkk., 2014). Penyajian data juga merupakan upaya peneliti untuk memperoleh pemahaman dan interpretasi dari data yang telah dikumpulkan, serta melihat keterkaitannya dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan (Samsu, 2021). Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks naratif, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, maupun format serupa lainnya, sehingga melalui

penyajian visual tersebut peneliti memperoleh kemudahan dalam memahami situasi yang diteliti serta dapat merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh (Hardani dkk., 2020).

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan dan verifikasi kesimpulan dalam analisis kualitatif merupakan proses berkelanjutan yang menafsirkan makna sejak awal pengumpulan data hingga akhir, dengan menguji validitas temuan melalui refleksi, pemeriksaan ulang, diskusi, maupun replikasi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis, terkonfirmasi, dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles dkk., 2014). Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang memadai, namun apabila bukti yang diperoleh pada tahap pengumpulan data lanjutan terbukti valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel serta layak untuk dipertahankan (Sugiyono, 2022). Dalam proses penarikan kesimpulan analisis data, apa yang terjadi (*what*), bagaimana prosesnya berlangsung (*how*), serta alasan yang melatarbelakanginya (*why*) (Hardani dkk., 2020). Kesimpulan dalam penelitian ini dibuat setelah seluruh data yang telah dikumpulkan melalui proses kondensasi, analisis, dan penyajian. Kesimpulan yang diambil didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh dari kantor Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat. Data tersebut kemudian dianalisis dan dijabarkan dengan menggunakan panduan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Weimer dan Vining.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi SIMERAK Langkat dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat telah berjalan sebagai instrumen pelaporan digital yang mendukung monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dari masih adanya variasi dalam ketepatan waktu dan konsistensi pelaporan antarperangkat daerah.

Hambatan implementasi dapat diidentifikasi pada tiga isu utama, yaitu: (1) belum terwujudnya integrasi dan adaptivitas sistem pelaporan, (2) ketidakmerataan dukungan sumber daya, serta (3) variasi kemampuan implementor yang mencakup perbedaan kompetensi, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan tingkat komitmen dan koordinasi. Ketiga isu tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan membentuk dinamika implementasi, di mana keterbatasan pada aspek sistem dan lingkungan menuntut penyesuaian di tingkat implementor, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas serta konsistensi pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Dengan demikian, implementasi aplikasi SIMERAK Langkat telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sistem pelaporan, pemerataan sumber daya, serta peningkatan kemampuan implementor secara berkelanjutan yang didukung oleh perbaikan tata kelola pelaporan.

Temuan penelitian ini juga perlu dipahami dalam konteks penelitian kualitatif yang dilakukan pada satu pemerintah daerah, sehingga lebih menekankan pada pemahaman proses dan dinamika implementasi pelaporan digital. Selain itu, penelitian ini belum mengukur efektivitas aplikasi secara kuantitatif maupun menganalisis integrasi teknis dengan sistem nasional secara mendalam. Oleh karena itu, hasil penelitian bersifat kontekstual dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah dan pendekatan metodologis yang lebih luas.

5.2 Saran

1. Saran Praktis

a. Penguatan aspek sistem pelaporan

Pemerintah Kabupaten Langkat perlu mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem nasional seperti SIPD, sehingga dapat mengurangi duplikasi input data dan meningkatkan konsistensi informasi antarplatform. Selain itu, diperlukan penyempurnaan desain sistem agar lebih adaptif terhadap siklus pelaporan, termasuk penyediaan fitur yang mendukung fleksibilitas pelaporan antar tahun anggaran guna menjamin kontinuitas pelaporan sejak awal tahun.

b. Pemerataan dukungan sumber daya

Perlu dilakukan pemerataan infrastruktur teknologi informasi antarperangkat daerah, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan jaringan dan perangkat kerja. Selain itu, dukungan anggaran perlu diarahkan tidak hanya pada pemeliharaan sistem, tetapi juga pada penguatan kapasitas pelaporan, sehingga pelaksanaan pelaporan dapat berjalan lebih merata dan optimal.

c. Peningkatan kemampuan implementor

Penguatan kemampuan implementor perlu dilakukan melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, pendampingan operasional, serta penataan sumber daya manusia yang mempertimbangkan kompetensi teknis dan substantif. Selain itu, perlu dilakukan pengurangan beban kerja rangkap bagi admin pelaporan agar pelaksanaan tugas dapat lebih fokus dan konsisten.

d. Penguatan tata kelola pelaporan

Diperlukan penyusunan regulasi teknis pelaporan yang lebih rinci dan operasional, mencakup standar penginputan dan verifikasi data, mekanisme evaluasi, serta pengaturan kepatuhan pelaporan. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme koordinasi dan pengendalian pelaporan melalui sistem monitoring berbasis kinerja untuk meningkatkan disiplin, konsistensi, dan kualitas pelaporan.

e. Penyusunan arah implementasi kebijakan yang terstruktur

Pemerintah Kabupaten Langkat perlu menyusun roadmap implementasi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Roadmap ini memuat tahapan pengembangan sistem, integrasi antarplatform, serta target kinerja pelaporan, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta meningkatkan konsistensi dan kualitas pelaporan antarperangkat daerah.

2. Saran Akademik

- a. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur secara lebih objektif tingkat kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi pelaporan antarperangkat daerah.
- b. Studi komparatif antar daerah perlu dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dalam implementasi sistem pelaporan digital.
- c. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada integrasi sistem digital antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk aspek teknis, kelembagaan, dan tata kelola data.
- d. Kajian mengenai peran kepemimpinan dan budaya organisasi dalam implementasi kebijakan digital perlu dikembangkan guna memperkaya kajian Ilmu Administrasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik; Teori dan Praktik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Samudra Biru.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Lukman Waris. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hastuti, D., Dewintari, P., Syaharuddin, A. Z., Syafaat, M., Zakiyabarsi, F., Muchtar, M., Kuntarto, G. P., Gunawan, P. W., & Pradnyana, I. M. A. (2024). *Buku Ajar Pengantar Teknologi Informasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, & Hipotesis*. CV. Eureka Media Aksara.
- Igrisa, I. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Tanah Air Beta.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Kamal, A. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press.
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. CV. MITRA ILMU.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Miles, M. B., A. Michael, H., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Vol. 17). SAGE Publications.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Unesa University Press.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.

- Purwanto. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. StaiaPress.
- Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, A, M. D. S., & Sari, D. (2022). *Kebijakan Publik*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Method serta Research and Development*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual dan Praktik*. DEEPUBLISH.
- Siagian, S. P. (2015). *Filsafat Administrasi, Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publising.
- Subarsono, A. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. BRILIANT.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (1999). Policy Analysis: Concepts and Practice. In *The American Review of Public Administration* (Third, Vol. 15, Issue 1). Prentice Hall.

Jurnal dan Sumber Lainnya

- Bening, P., Susanti, E., & Buchari, R. A. (2022). Inovasi Kebijakan E-Monevlap (Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) pada Bagian Program Desain Kualitas dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 90.
- Furqonia, F. N., Ratnawati, S., & Prasetyowati, T. (2023). Implementasi Aplikasi E-Kenda Sebagai Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *Publiciana*, 16(02), 60–70.
- Gulick, L., Urwick, L., Mooney, J. D., Fayol, H., Dennison, H. S., Henderson, L. J., Whitehead, T. N., Mayo, E., Follett, M. B., Lee, J., & Graicunas, V. A. (1937). Papers on the Science of Administration. In *Institute of Public Administration, Columbia University*.
- Heryana, A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Esa Unggul.

- Ma'arif, K. (2016). *Laporan Akhir Proyek Perubahan Breakthrough II - Laboratorium Kepemimpinan - Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Keuangan dan Fisik APBD dengan Aplikasi "SIMERAK" (Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Anggaran Kabupaten)*.
- Mamengko, D. N. (2022). Pelaporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) di Kabupaten Minahasa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 63–70.
- Mirawati, A. M. (2024). Monitoring Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Di UPT RSUD Sayang Rakyat. *Jurnal Dunia Kesmas*, 13(4), 313–318.
- Nasrullah, M. (2015). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 53–63.
- Yunus, N. (2015). *Reporting (Pelaporan)*. <https://nurfaizinyunus.blogspot.com/2015/03/reporting-pelaporan.html>.
- Pati, B., Ferdian, K. J., & Rahman, B. (2022). *Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi terhadap Aplikasi SMART IN PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka*. 6(2), 245–263.
- Permadi, D. S. (2018). *Cara Menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan*. <https://danisuluhpermadi.web.id/perencanaan-dan-keuangan/cara-menyusun-laporan-realisisi-fisik-dan-keuangan>.
- Rumondor, M. D., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Belanja Daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 14(1).
- Swesty, M. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Berbasis Digital di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada Tahun 2017-2019. *JOM FISIP*, 7.
- Tahir, A. (2019). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. Academia Education.
- Warsito, H. T. (2016). Kebijakan dan Manajemen Publik Implementasi Program E-Kios sebagai Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 2313-341X.
- Zalmi, M. F., & Eliza, R. (2025). Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 15(1), 62–73.

Peraturan

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Nomor 900-20/K/SEKR/2025 Tentang Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat.

Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat

Lokus Penelitian: Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat

Landasan Teori : Weimer dan Vining

Peneliti : Khoirul Ma'arif

NPM : 231801039

Prodi : Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area

Daftar pertanyaan wawancara yang disusun berlandaskan teori implementasi weimer dan vining

Aspek	Indikator	Pertanyaan
1. Logika Kebijakan	a. Kejelasan Tujuan	Bagaimana Kejelasan Tujuan dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
		Sub pertanyaan
		1) Menurut Anda, apakah tujuan dari kebijakan pelaporan dengan aplikasi SIMERAK Langkat sudah jelas?
		2) Apa yang Anda pahami tentang tujuan utama dari penerapan pelaporan dengan aplikasi SIMERAK Langkat?
		3) Apakah tujuan tersebut tercantum dalam dokumen resmi atau disampaikan dalam sosialisasi?
	b. Kesesuaian Fungsi dengan Kebutuhan	Bagaimana Kesesuaian Fungsi dengan Kebutuhan dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
		Sub pertanyaan
		1) Apakah fungsi dari aplikasi SIMERAK Langkat sesuai dengan kebutuhan di lapangan?

		2) Dalam hal apa aplikasi tersebut membantu tugas Anda, serta fungsi atau fitur apa saja menurut Anda yang perlu ditambahkan?
		3) Apakah terdapat fungsi yang tidak relevan atau kurang berguna?
	c. Kemudahan Pemahaman dan Penggunaan	Bagaimana Kemudahan Pemahaman dan Penggunaan dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
		Sub pertanyaan
		1) Seberapa mudah Anda memahami isi kebijakan atau panduan pelaksanaan pelaporan dengan aplikasi SIMERAK Langkat?
		2) Apakah telah dilaksanakan pelatihan atau diberikan panduan penggunaan?
		3) Bagian mana dari aplikasi tersebut yang menurut Anda paling sulit dipahami?
	d. Integrasi dengan Sistem dan Kebijakan Lain	Bagaimana Integrasi dengan Sistem dan Kebijakan Lain dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
		Sub pertanyaan
		1) Apakah aplikasi SIMERAK Langkat sudah terintegrasi dengan sistem lain yang Anda gunakan?
		2) Apakah ada tumpang tindih antara aplikasi SIMERAK Langkat dan sistem lainnya?
		3) Apakah jika integrasi tersebut dilakukan akan mempermudah atau malah mempersulitkan pekerjaan Anda?
2. Lingkungan Kebijakan	a. Infrastruktur Teknologi	Bagaimana Infrastruktur Teknologi dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
		Sub pertanyaan
		1) Bagaimana kondisi infrastruktur teknologi di tempat Anda dalam mendukung pelaksanaan pelaporan dengan aplikasi SIMERAK Langkat?

	2) Apakah perangkat teknologi dan jaringan internet memadai?
	3) Apakah kendala teknis yang sering dihadapi yang menghambat pelaporan?
b. Ketersediaan Anggaran	Bagaimana Ketersediaan Anggaran dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
	Sub pertanyaan
	1) Apakah anggaran yang tersedia sudah cukup mendukung pelaksanaan pelaporan dengan aplikasi SIMERAK Langkat?
	2) Apakah anggaran digunakan untuk pelatihan, perangkat, atau kegiatan pendukung lainnya?
	3) Adakah kegiatan penting yang tertunda karena keterbatasan anggaran dan apa dampaknya terhadap kebijakan?
c. Dukungan Pimpinan dan Stakeholder	Bagaimana Dukungan Pimpinan dan Stakeholder dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
	Sub pertanyaan
	1) Sejauh mana pimpinan dan stakeholder mendukung pelaksanaan pelaporan dengan aplikasi SIMERAK Langkat?
	2) Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh pimpinan?
	3) Bagaimana keterlibatan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kebijakan?
d. Regulasi dan Kebijakan Pendukung	Bagaimana Regulasi dan Kebijakan Pendukung dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
	Sub pertanyaan
	1) Apakah terdapat kebijakan atau regulasi yang mendukung implementasi pelaporan dengan aplikasi SIMERAK Langkat?
	2) Apakah regulasi tersebut sudah cukup mendetail dan sesuai konteks daerah?

		.3) Bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut?
3. Kemampuan Implementor	a. Kompetensi Pelaksana	Bagaimana Kompetensi Pelaksana dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
		Sub pertanyaan
		.1) Menurut Anda, apakah pelaksana memiliki kompetensi teknis yang cukup dalam melaksanakan pelaporan dengan aplikasi SIMERAK Langkat?
		.2) Apakah ada pelatihan atau peningkatan kapasitas sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan?
		.3) Bagaimana pelaksana menyelesaikan permasalahan teknis yang muncul?
	b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia	Bagaimana Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
		Sub pertanyaan
		.1) Apakah jumlah dan kapasitas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan pelaporan melalui aplikasi SIMERAK Langkat sudah mencukupi?
		.2) Apakah pembagian tugas dan beban kerja dilakukan dengan jelas dan adil?
		.3) Apakah terdapat SDM yang khusus menangani pelaporan dengan aplikasi SIMERAK Langkat?
	c. Komitmen dan Motivasi Pelaksana	Bagaimana Komitmen dan Motivasi Pelaksana dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
		Sub pertanyaan
		.1) Bagaimana tingkat komitmen dan motivasi pelaksana dalam menjalankan pelaporan melalui aplikasi SIMERAK Langkat?
		.2) Apakah yang mendorong pelaksana tetap melaksanakan tugas dengan baik?

	.3) Apakah ada penghargaan, insentif atau pengakuan yang diberikan oleh atasan atau pimpinan?
d. Koordinasi dan Komunikasi	Bagaimana Koordinasi dan Komunikasi dalam Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat dalam Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat?
Sub pertanyaan	
	.1) Bagaimana koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pelaporan melalui aplikasi SIMERAK Langkat?
	.2) Apakah terdapat forum atau media komunikasi dan koordinasi atau pertemuan rutin?
	.3) Apakah koordinasi dan komunikasi berjalan efektif selama proses implementasi?

LEMBAR JAWABAN

1. Logika Kebijakan
 - a. Kejelasan Tujuan

.....

.....
 - b. Kesesuaian Fungsi dengan Kebutuhan

.....

.....
 - c. Kemudahan Pemahaman dan Penggunaan

.....

.....
 - d. Integrasi dengan Sistem dan Kebijakan Lain

.....

.....
2. Lingkungan kebijakan
 - a. Infrastruktur Teknologi

.....

.....
 - b. Ketersediaan Anggaran

.....

.....
 - c. Dukungan Pimpinan dan Stakeholder

.....

.....
 - d. Regulasi dan Kebijakan Pendukung

.....

.....
3. Kemampuan Implementor
 - a. Kompetensi Pelaksana

.....

.....
 - b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

.....

.....
 - c. Komitmen dan Motivasi Pelaksana

.....

.....
 - d. Koordinasi dan Komunikasi

.....

.....

Lampiran 2. Dokumentasi Foto Penelitian



Wawancara dengan Informan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat



Wawancara dengan Informan, Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan



Wawancara dengan Informan, Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan



Wawancara dengan Informan, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan



Wawancara dengan Informan, Admin SIMERAK Langkat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



Wawancara dengan Informan, Admin SIMERAK Langkat pada Dinas Kesehatan



Wawancara dengan Informan, Admin SIMERAK Langkat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Wawancara dengan Informan, Admin SIMERAK Langkat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



Wawancara dengan Informan, Admin SIMERAK Langkat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Wawancara dengan Informan, Admin SIMERAK Langkat
pada Badan Pendapatan Daerah



Wawancara dengan Informan, Admin SIMERAK Langkat
pada Kecamatan Pematang Jaya



Wawancara dengan Informan, Admin SIMERAK Langkat
pada Kecamatan Hinai

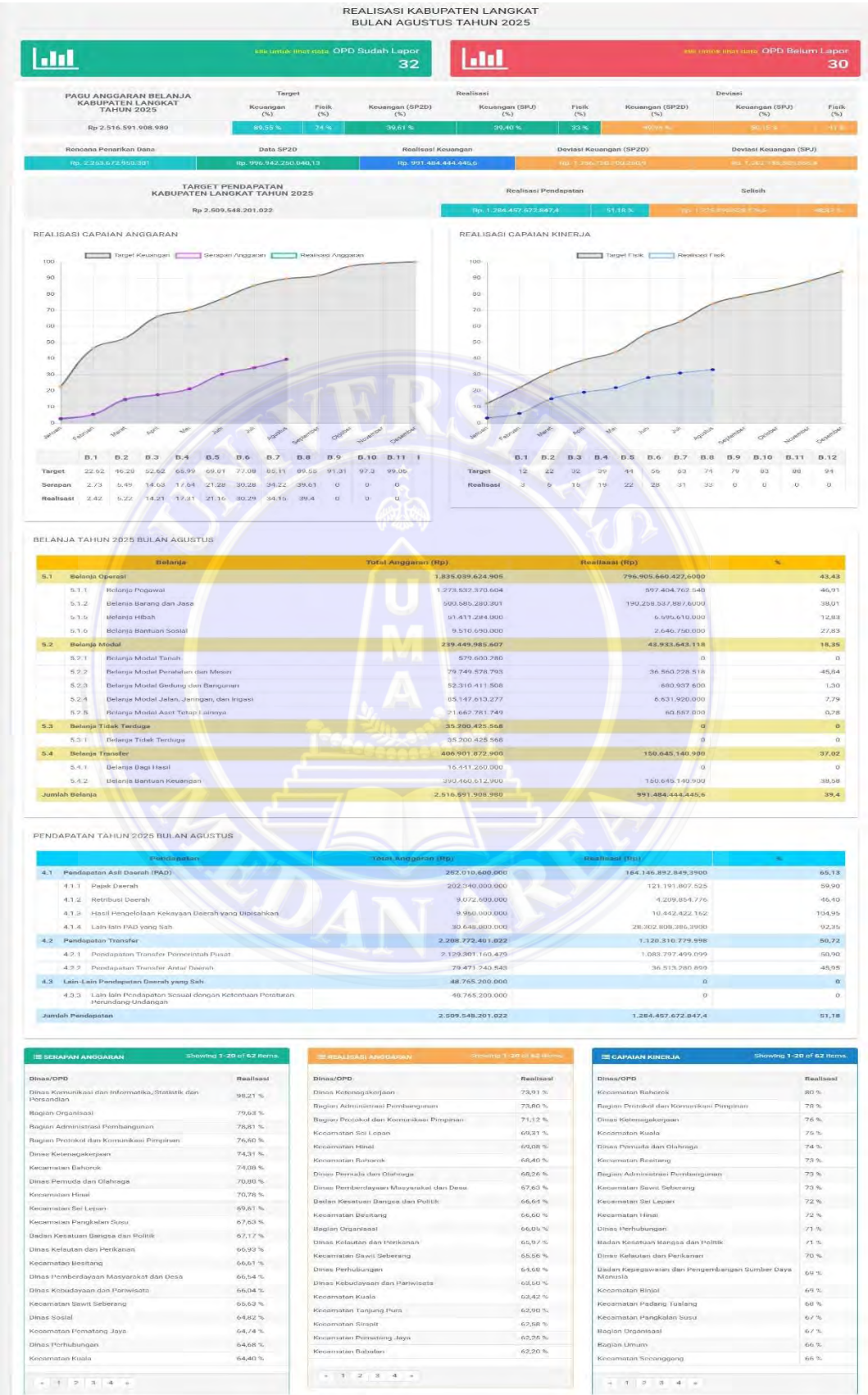


Wawancara dengan Informan, Admin SIMERAK Langkat pada Kecamatan Sirapit



Keterlibatan peneliti dalam kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan, terutama dalam penanganan laporan realisasi fisik dan keuangan pada aplikasi SIMERAK Langkat

Lampiran 3. Capture Menu Beranda atau Dashboard SIMERAK Langkat



Lampiran 4. Format Cetak Laporan Rekapitulasi, Ringkasan, dan Rincian pada SIMERAK Langkat

REKAPITULASI LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ANGGARAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2025																	
PERIODE: S.D. JUNI (PER TANGGAL 21 NOVEMBER 2025)																	
NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TOTAL BELANJA	BOBOT (%)	RENCANA PENAIKIAN DANA S.D. BULAN INI (TARGET KEUANGAN)		SP2D S.D. BULAN INI (SERAPAN KEUANGAN)		REALISASI S.D. BULAN INI (REALISASI KEUANGAN)		SISA ANGGARAN		KEMAJUAN FISIK S.D. BULAN INI			KETERANGAN		
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	DEVIASI (%)	JUMLAH	%	DEVIASI (%)	JUMLAH	%	TARGET FISIK (%)		REALISASI FISIK (%)	DEVIASI (%)
1	Dinas Pendidikan	961.207.137.401	36,17	776.231.479.701	80,76	262.358.575.276	27,20	53,47	261.448.121.090	27,20	53,56	699.759.016.311	72,80	52	27	25	Belum Melapor
2	Dinas Kesehatan	374.209.592.370	14,08	223.989.855.153	59,87	134.545.943.547	35,95	23,91	134.238.365.147	35,87	23,99	239.971.227.223	64,13	65	41	24	Terlapor
3	Rumah Sakit Umum Tanjung Pura	57.867.319.130	2,18	15.200.000.000	26,28	14.796.419.151	25,57	0,70	14.796.323.858	25,57	0,70	43.070.995.272	74,43	36	28	8	Terlapor
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	152.604.562.831	5,74	75.266.738.009	49,32	12.629.640.856	8,28	41,04	2.433.418.048.6000	8,15	41,17	140.171.144.782.4	91,85	16	14	2	Belum Melapor
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	73.171.719.352	2,75	15.851.641.231	21,39	2.712.247.734	3,71	17,68	2.679.354.634	3,66	17,73	70.492.364.718	96,34	12	5	8	Terlapor
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.700.526.164	0,33	7.228.770.882	83,08	4.576.338.359	52,60	30,48	4.571.268.360	52,54	30,54	4.129.257.804	47,46	71	56	15	Belum Melapor
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keb	18.011.571.348	0,68	12.437.216.359	69,05	6.436.903.809	35,74	33,31	6.300.804.409	34,96	34,07	11.710.766.939	65,02	46	36	9	Terlapor
8	Dinas Sosial	7.059.297.035	0,27	5.784.720.196	81,98	3.506.707.761	49,70	32,28	3.286.773.561	46,58	35,40	3.769.523.474	53,42	60	55	5	Terlapor
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.096.084.355	0,27	6.027.609.728	84,92	2.831.244.525	39,89	45,03	2.714.596.125	38,24	46,68	4.383.488.230	61,76	63	42	20	Terlapor
10	Dinas Ketenagakerjaan	9.524.709.451	0,36	5.419.266.257	56,90	3.983.375.913	41,82	15,08	3.905.719.300	41,01	15,89	5.610.050.151	58,99	57	53	4	Terlapor
11	Dinas Lingkungan Hidup	22.048.874.515	0,83	14.783.140.852	67,05	7.269.287.910	32,97	34,08	6.955.644.510	31,55	35,50	15.093.230.005	68,45	66	41	25	Terlapor
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.686.093.237	0,40	10.464.990.747	97,93	4.844.862.943	45,34	52,59	4.641.071.143	43,43	54,50	6.045.022.094	56,57	56	47	9	Terlapor
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.476.585.379	0,51	9.723.219.554	72,15	7.436.631.174	55,18	16,97	7.098.037.639	52,67	19,48	6.378.547.741	47,33	71	64	8	Terlapor
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Beras	20.608.514.935	0,78	11.767.831.971	57,10	3.877.314.645	18,81	38,29	3.875.046.470	18,80	38,30	16.733.468.465	81,20	59	20	39	Terlapor
15	Dinas Perhubungan	37.602.182.178	1,41	22.793.531.396	60,62	17.440.674.139	46,38	14,24	17.291.865.739	45,99	14,63	20.310.286.439	54,01	62	47	16	Terlapor
16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan	12.418.676.049	0,47	8.633.745.928	69,53	4.788.718.960	38,57	30,96	4.761.040.863	38,34	31,19	7.655.635.186	61,66	67	63	4	Belum Melapor
17	Dinas Koperasi	6.141.955.921	0,23	4.416.379.917	71,91	2.072.857.410	33,75	38,16	2.004.433.210	32,64	39,27	4.137.522.711	67,38	58	36	21	Belum Melapor
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.355.175.491	0,35	5.045.972.071	53,94	4.280.535.626	45,86	8,08	4.099.837.026	43,82	10,12	5.255.338.376	56,18	69	37	32	Terlapor
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Periz	6.313.793.578	0,24	4.597.456.685	72,82	2.339.561.128	37,05	35,77	2.249.798.129	35,63	37,19	4.063.995.450	64,37	53	45	7	Terlapor

LAPORAN RINGKASAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BULAN JUNI TAHUN 2025									
Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan				Sisa Dana s.d. Bulan Ini (Rp)	Kemajuan Fisik s.d. Bulan Ini	
			s.d. Bulan Lalu (Rp)	Bulan Ini (Rp)	s.d. Bulan Ini (Rp)	Persentase (%)		Target (%)	Realisasi (%)
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
4.1	Unsur Sekretariat Daerah	535.825.846	261.976.002	-	261.976.002	48,89	273.849.844	70	52
4.1.3	Program Perekonomian dan Pembangunan	535.825.846	261.976.002	-	261.976.002	48,89	273.849.844	70	52
4.1.3.2.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	535.825.846	261.976.002	-	261.976.002	48,89	273.849.844	70	52
4.1.3.2.2.1	fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	150.738.471	87.261.971	-	87.261.971	57,89	63.476.500	62	62
4.1.3.2.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	157.114.031	111.944.031	-	111.944.031	71,25	45.170.000	87	75
4.1.3.2.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	227.973.344	62.770.000	-	62.770.000	27,53	165.203.344	63	30
JUMLAH		535.825.846	261.976.002	-	261.976.002	48,89	273.849.844	70	52

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BULAN JUNI TAHUN 2025										
Unsur	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
Bidang	: 4.1 UNSUR SEKRETARIAT DAERAH									
Program	: 4.1.3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
Kegiatan	: 4.1.3.2.2 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
Sub Kegiatan	: 4.1.3.2.2.1 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAANPEMBANGUNAN									
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Realisasi Keuangan				Sisa Dana Sampai Bulan Ini (Rp)	Kemajuan Fisik	
				s.d. Bulan Lalu (Rp)	Bulan Ini (Rp)	s.d. Bulan Ini (Rp)	Persentas e %		Target (%)	Realisasi (%)
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.783.344	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	0	13.783.344	100	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	0	1.800.000	70	0
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.220.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	0	16.220.000	0	0
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	0	3.000.000	0	0
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Selektanat Tim Pelaksana Kegiatan	62.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30.000.000	-	30.000.000	36,36	52.500.000	100	40
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	42.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	0	42.000.000	0	0
5.1.2.3.2.409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	0	1.380.000	0	0
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.490.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7.770.000	-	7.770.000	27,27	20.720.000	75	35
5.1.2.4.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-	0	13.800.000	0	0
5.2.2.10.1.2	Belanja Modal Personal Computer	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	25.000.000	-	25.000.000	100	0	100	100
JUMLAH		227.973.344		62.770.000	-	62.770.000	27,53	165.203.344	83	30

Lampiran 5. Surat ke BPKP tentang Permohonan Integrasi SIMERAK Langkat dengan FMIS



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat Kode Pos 20814
 Telepon : (061) 8910202 Fax. (061) 8910603 Email : sekretariat@langkatkab.go.id
 Website : www.langkatkab.go.id

Nomor : 912-1036 /Adbang/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Perihal : Permohonan Integrasi Data Aplikasi
 SIMERAK Langkat dengan Aplikasi
 SIMDA-NG atau FMIS.

Stabat, 7 Agustus 2023
 Kepada Yth.
 Kepala Perwakilan BPKP
 Provinsi Sumatera Utara
 di –
 Medan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat, Pemerintah Kabupaten Langkat telah membangun dan terus mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat atau disingkat SIMERAK Langkat.

Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala seiring dengan penerapan e-Government dan SPBE yang mengharuskan Pemerintah Daerah menggunakan banyak aplikasi yang tidak menutup kemungkinan terjadinya penginputan dua kali atau lebih data yang sama untuk beberapa aplikasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini mengakibatkan beban kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat semakin meningkat yang dapat mengakibatkan tidak akuratnya data maupun tidak tertanganinya dengan baik salah satu atau beberapa aplikasi tersebut.

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat mempunyai inisiatif berencana melakukan integrasi data antara aplikasi SIMERAK Langkat dengan aplikasi SIMDA-NG (FMIS) yang dikembangkan oleh BPKP. Oleh karena itu dengan ini Pemerintah Kabupaten Langkat memohon izin, dukungan, fasilitasi dan kerjasama dari BPKP untuk dapat merealisasikan rencana integrasi dimaksud. Besar harapan kami agar kiranya pihak BPKP berkenan memberikan izin dan dukungan serta berkenan melakukan fasilitasi dan kerjasama agar rencana integrasi tersebut dapat terlaksana dengan lancar. Untuk mempermudah koordinasi selanjutnya dapat menghubungi kontak person: Khoirul Ma'arif (085270019890).

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI LANGKAT
 SEKRETARIS DAERAH

 AMRIL, S. Sos, M.AP
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19690927 199102 1 001

Tembusan:
 - Yth. Bapak Plt. Bupati Langkat (sebagai laporan).

Lampiran 6. DPA Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan T.A. 2025 Sebelum Adanya Efisiensi Anggaran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD				
Pemerintahan Kab. Langkat Tahun Anggaran 2025						
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
Urusan Pemerintahan	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Unit Organisasi	4.01.00.00.00.01.0006 Sekretariat Daerah					
Sub Unit Organisasi	-					
Program	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMERIKAAAN					
Kegiatan	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
Sub Kegiatan	4.01.03.2.02.0003 Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					
SPM	-					
Jenis Layanan	-					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokat	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Juli s.d Desember					
Akomposi Satuan	Kab. Langkat					
Alokasi 2025	Rp. 0,00					
Alokasi 2026	Rp. 343.669.929,00					
Alokasi 2027	Rp. 378.037.251,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program	-	-				
Misalan	Dana yang dibagikan	Rp. 343.669.929,00				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Harapan				
Hasil	-	-				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	4.01.03.2.02.0003 Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					
Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokas	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					
Waktu Pelaksanaan	Juli s.d Desember					
Keluaran	-					
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan	Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 343.669.929,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 343.669.929,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 343.669.929,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.338.929,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.338.929,00
5.1.02.01.001.900.28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Alat Tulis Kantor					Rp. 5.589.929,00
	[8] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.589.929,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	pph	
	Pulpen Ballpoint Spesifikasi :-	2	Kotak	212.875,00	0 %	Rp. 427.350,00
	Pulpen Spesifikasi :-	2	Lusin	34.270,00	0 %	Rp. 68.540,00
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi :-	6	Rim	63.250,00	0 %	Rp. 379.500,00
	Kertas A4 Spesifikasi :-	8	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	Stabilo warna (bisa) Spesifikasi :-	6	Bush	10.620,00	0 %	Rp. 63.720,00
	Pensil 2B/4B Spesifikasi :-	12	Bush	5.775,00	0 %	Rp. 69.300,00
	Sep pensil Spesifikasi :-	8	Bush	6.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi :-	15	Botol	140.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Tipe-X Spesifikasi :-	3	Bush	19.312,00	0 %	Rp. 57.936,00
5.1.02.01.001.000 20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.250.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.250.000,00
	[-] Photocopy					Rp. 2.250.000,00
	Photocopy Spesifikasi :-	1500	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.001.000 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.100.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 14.100.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.100.000,00
	Nasi Kotak Spesifikasi :-	300	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi :-	300	Kotak	17.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.02.001.000 64	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 100.000.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 100.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPH	
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 108.690.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Diangkat Kepala Daerah (Pangreh)	12	OR	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Diangkat Kepala Daerah (Perangup)	12	OR	1.200.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Diangkat Kepala Daerah (Koruk)	12	OR	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Diangkat Kepala Daerah (Sekoruk)	12	OR	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Diangkat Kepala Daerah (Angguk)	12 x 5	Bulan Cheng	750.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
S.1.02.02.001.000.00	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 42.400.000,00
	[#] Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 42.400.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Jasa Administrator dan Keamanan Informasi Aplikasi					Rp. 42.400.000,00
	Jasa administrator aplikasi/tergoda aplikasi	12	OR	3.500.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
S.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 171.730.000,00
S.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 171.730.000,00
S.1.02.04.001.000.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 57.500.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 57.500.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 57.500.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	8	Tahun	87.500.000,00	0 %	Rp. 67.500.000,00
S.1.02.04.001.000.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.250.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.250.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kematan					Rp. 17.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115	OR	150.000,00	0 %	Rp. 17.250.000,00
S.1.02.04.001.000.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 96.980.000,00
	[#] Meeting Luar Kota					Rp. 96.980.000,00
	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Meeting Luar Kota					Rp. 96.980.000,00

Lampiran 7. Surat Permintaan Penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat T.A. 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20814
 Telepon (061) 8910202, Faksimile (061) 8910603,
 Laman www.langkatkab.go.id, Pos-el sekretariat@langkatkab.go.id

Stabat, 5 Mei 2025

Nomor : 000.7.5-42/ADBANG/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD T.A. 2025.

Yth.

1. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Langkat
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kab. Langkat
3. Direktur RSU Tanjung Pura Kabupaten Langkat

di
 Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Perubahannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat melalui Bagian Administrasi Pembangunan bertugas menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Oleh karena itu maka dilaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025.

Berkas dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD periode bulan Januari s.d. April 2025 melalui aplikasi SIMERAK Langkat **paling lambat tanggal 20 Mei 2025**.

Selanjutnya untuk laporan bulan-bulan berikutnya harus sudah disampaikan **paling lambat tanggal 10** setiap bulannya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah



Amril

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 8. Notula Rapat Evaluasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20814,
Telepon (061) 8910202 Faksimile (061) 8910603,
Laman www.langkatkab.go.id, Pos-el sekretariat@langkatkab.go.id

NOTULA

- Rapat** : Rapat Evaluasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023.
- Hari/Tanggal** : Jum'at, 29 Desember 2023.
- Surat Undangan** : Nomor 005-2996/Adbang/2023 tanggal 22 Desember 2023.
- Waktu Rapat** : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai.
- Acara** : 1. Pendahuluan
2. Arahan
3. Evaluasi
4. Penutup.
- Pimpinan Rapat**
- Ketua** : H. Sukhyar Mulyamin, S.Sos, M.Si
(Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Langkat).
- Sekretaris** : T. Syafrie Elza Hadi Prawira, S.STP, M.AP
(Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat).
- Pencatat** : Mahriza Indah
(Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat).
- Peserta Rapat** : 1. Para Pejabat Eselon III beserta Staf OPD yang menangani Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023.
2. Analis Kebijakan Ahli Muda yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat.
3. Para Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat.
- Kegiatan Rapat** : 1. Pendahuluan
Rapat diawali dengan pendahuluan dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Perubahannya, Sekretariat Daerah melaksanakan pengendalian administratif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dengan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap serapan anggaran serta realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan penyerapan dan realisasi anggaran di tengah fenomena rendahnya penyerapan

Lampiran 9. Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Implementasi Aplikasi SIMERAK Langkat



Lampiran 10. Laporan Kegiatan Rapat Teknis dan Pelatihan Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan dengan SIMERAK Langkat

LAPORAN KEGIATAN RAPAT TEKNIS DAN PELATIHAN PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ANGGARAN KABUPATEN LANGKAT MENGUNAKAN APLIKASI SIMERAK LANGKAT TAHUN 2022

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 912-2789/Adbang/2022 tanggal 07 Oktober 2022 perihal Permintaan Data Operator Aplikasi Simerak Langkat.
6. Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 1493/SP/Adbang/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Perintah untuk Menjadi Peserta dan Mengikuti Kegiatan Rapat Teknis dan Pelatihan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Kabupaten Langkat Menggunakan Aplikasi Simerak Langkat Tahun 2022.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Maksud kegiatan Rapat Teknis dan Pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan anggaran Kabupaten Langkat.
2. Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk:
 - a. Mengkoordinasikan tentang teknis pelaporan movev realisasi fisik dan keuangan anggaran Kabupaten Langkat dan mengkomunikasikan permasalahan serta kendala yang dihadapi OPD agar dapat ditemukan bersama solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut.
 - b. Melaksanakan pelatihan terhadap personil OPD tentang penggunaan aplikasi Simerak Langkat sebagai media pelaporan monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan anggaran Kabupaten Langkat.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Teknis dan Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu pada :

Hari : Kamis s.d. Sabtu

Tanggal : 03 s.d. 05 November 2022

Tempat : Hotel Grand Central Medan, Jl. Sei Belutu 1 No. 17B, Medan Baru, Medan.

D. Narasumber

Narasumber kegiatan ini terdiri dari: Bapak Amril, S.Sos, M.AP (Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Langkat), dan Saudara Jiwana Syah Putra, S.Kom (Tenaga Ahli Programmer yang membangun dan mengembangkan Aplikasi Simerak Langkat).

E. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini sebanyak 66 orang yang berasal dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat serta Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang bertugas menangani pelaporan realisasi fisik dan keuangan anggaran menggunakan Aplikasi Simerak Langkat.

F. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan kepada Perubahan APBD (P.APD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 Pos Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat.

G. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Rapat Teknis dan Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 03 s.d. 05 November 2022 bertempat di Hotel Grand Central Medan.
2. Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Bupati Langkat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat (Bapak Amril, S.Sos, M.AP).
3. Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber pertama, yaitu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, Bapak Amril, S.Sos, M.AP.
4. Pada hari kedua, dilaksanakan rapat teknis pelaporan movev realisasi fisik dan keuangan anggaran Kabupaten Langkat tahun 2022, yang membahas tentang hal-hal teknis terkait pelaporan tersebut. Disini disampaikan tentang pengembangan aplikasi Simerak Langkat yang sedang dilaksanakan maupun rencana pengembangan kedepannya, fitur dan menu apa yang ditambahkan serta perubahan yang dihasilkan. Disampaikan juga berbagai bentuk kesalahan yang sering dilakukan OPD dalam melaksanakan pelaporan melalui aplikasi Simerak Langkat. Peserta rapat juga diminta untuk menyampaikan tentang kendala dan permasalahan apa yang mereka alami dalam pelaksanaan pelaporan, serta mengajukan pertanyaan, saran dan masukan terkait pelaksanaan pelaporan dengan aplikasi Simerak Langkat. Bagian Administrasi Pembangunan menampung semua permasalahan dan kendala, pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh peserta. Bagian Administrasi Pembangunan menjelaskan apa yang bisa dijawab dan dijelaskan, namun jika ada yang belum bisa dijawab, maka hal itu akan menjadi PR dan akan disampaikan kepada Pengembang untuk mendapatkan penjelasan. Disini ditekankan juga bahwa tingkat kedisiplinan OPD dalam melaksanakan pelaporan masih sangat minim, untuk itu diminta kepada OPD agar meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian laporan melalui aplikasi Simerak Langkat.

5. Setelah selesai rapat teknis, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber kedua, yaitu Tenaga Ahli Programmer yang membangun dan mengembangkan Aplikasi Simerak Langkat, Saudara Jiwana Syah Putra, S.Kom.
6. Selanjutnya dilaksanakan pelatihan penginputan laporan realisasi fisik dan keuangan anggaran Kabupaten Langkat menggunakan aplikasi Simerak Langkat yang dipandu oleh Saudara Jiwana Syah Putra, S.Kom dan dibantu oleh personil dari Bagian Administrasi Pembangunan.
7. Kegiatan hari ketiga adalah coaching clinic penggunaan aplikasi Simerak Langkat yang dipandu oleh Bagian Administrasi Pembangunan, dimana personil OPD yang telah belajar melakukan input laporan realisasi fisik dan keuangan namun masih mengalami kesulitan, dapat berkonsultasi langsung dengan personil Bagian Administrasi Pembangunan yang siap membantu dan mengarahkan personil OPD dalam melakukan penginputan yang benar.
8. Setelah selesai semua rangkaian acara kegiatan rapat teknis dan pelatihan tersebut, dilaksanakanlah penutupan kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan juga memberikan penekanan kepada OPD agar meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam melaksanakan pelaporan realisasi fisik dan keuangan anggarannya agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pelaporan monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan anggaran Kabupaten Langkat.

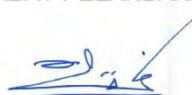
H. Hasil

1. Kegiatan Rapat Teknis dan Pelatihan yang dilaksanakan selama 3 hari berjalan dengan lancar dan sukses, para peserta antusias terhadap materi yang disampaikan oleh para Narasumber serta bersemangat dalam mengikuti pelatihan sampai dengan selesai.
2. Tersampainya informasi tentang pengembangan aplikasi Simerak Langkat kepada para personil OPD, serta terinventarisirnya kesalahan yang sering dilakukan OPD dalam melaksanakan pelaporan, kendala dan permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan pelaporan, pertanyaan, saran dan masukan terkait pelaporan dengan aplikasi Simerak Langkat yang telah ditemukan bersama solusinya serta sebagian dapat menjadi masukan untuk penentuan kebijakan maupun pengembangan aplikasi lebih lanjut.
3. Bertambahnya pengetahuan dan kompetensi personil OPD tentang teknis penggunaan aplikasi Simerak Langkat sebagai media pelaporan monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan anggaran Kabupaten Langkat.

I. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



KHOIRUL MA'ARIF, S.Kom
NIP. 19830628 200903 1 006

Lampiran 11. Surat Penjanjian Kerja Tenaga Administrator dan Keamanan Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20814
 Telepon (061) 8910202, Faksimile (061) 8910603.
 Laman www.langkatkab.go.id, Pos-el sekretariat@langkatkab.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA
 TENAGA ADMINISTRATOR DAN KEAMANAN INFORMASI APLIKASI
 SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI
 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LANGKAT
 NOMOR: 01/PK/Admang/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima, dengan mengambil tempat di Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 1 Kota Stabat, sebagai Domisili Hukum,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Syafrie Elza Hadi Prawira, S.STP, M.AP
 NIP : 19910626 201010 1 001
 Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
 Langkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran
 Alamat : Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 1, Kota Stabat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan

Nama : Jiwana Syah Putra, S.Kom
 Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 06 April 1991
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Dusun Bukit, Desa Tanjung Karang,
 Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh
 Tamiang
 Pendidikan Terakhir : S1 Komputer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA dalam rangka pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat atau SIMERAK Langkat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang diperjanjikan dari surat perjanjian kerja ini.

Lampiran 12. Rapor Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20814
 Telepon (061) 8910202, Faksimile (061) 8910603,
 Laman www.langkatkab.go.id, Pos-el sekretariat@langkatkab.go.id

Stabat, 17 Desember 2024

Nomor : 000.7.5-932/ADBANG/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) set
 Hal : Rapor Penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kondisi s.d. Bulan November 2024.

Yth,
 1. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Langkat
 2. Para Kepala Bagian Setdakab. Langkat
 3. Direktur RSU Tanjung Pura
 di
 Tempat.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 melalui aplikasi SIMERAK Langkat, masih terdapat Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang belum menyampaikan laporan untuk kondisi sampai dengan bulan November 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Rapor Penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dan RSU Tanjung Pura Kabupaten Langkat kondisi laporan sampai dengan bulan November 2024 sebagai Bahan Evaluasi.

Selanjutnya kepada Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah menyampaikan laporan dengan tepat waktu dan telah sesuai data laporannya, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, harap hal tersebut dapat dipertahankan.

Kepada Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang belum menyampaikan laporan atau data laporannya belum sesuai, diminta agar segera menyampaikan dan menyesuaikan. Segera berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat jika mengalami kendala terkait pelaporan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah


 Amril

**RAPOR PENYAMPAIAN LAPORAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KABUPATEN LANGKAT
DARI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
PERIODE S.D. BULAN NOVEMBER 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	STATUS PELAPORAN	PERMASALAHAN/ KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	sudah diterima	
2	Dinas Kesehatan	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
3	Rumah Sakit Umum Tanjung Pura	sudah diterima	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	sudah diterima	
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	sudah diterima	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
8	Dinas Sosial	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	sudah diterima	
10	Dinas Ketenagakerjaan	sudah diterima	
11	Dinas Lingkungan Hidup	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum Diterima	Sudah mengirim laporan namun ditolak karena ada data yang belum sesuai
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
15	Dinas Perhubungan	Belum Diterima	Sudah mengirim laporan namun ditolak karena ada data yang belum sesuai
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
17	Dinas Koperasi	sudah diterima	
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	sudah diterima	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	sudah diterima	
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	sudah diterima	
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	sudah diterima	
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	sudah diterima	
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
25	Sekretariat DPRD	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
26	Inspektorat	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	STATUS PELAPORAN	PERMASALAHAN/ KETERANGAN
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	sudah diterima	
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
29	Badan Pendapatan Daerah	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
30	Badan Kepegawaian Daerah	sudah diterima	
31	Bagian Umum	sudah diterima	
32	Bagian Organisasi	sudah diterima	
33	Bagian Kesejahteraan Rakyat	sudah diterima	
34	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
35	Bagian Hukum	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
36	Bagian Pemerintahan	sudah diterima	
37	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
38	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Belum Diterima	Sudah mengirim laporan namun ditolak karena ada data yang belum sesuai
39	Bagian Administrasi Pembangunan	sudah diterima	
40	Kecamatan Bahorok	sudah diterima	
41	Kecamatan Salapian	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
42	Kecamatan Kuala	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
43	Kecamatan Selesai	sudah diterima	
44	Kecamatan Sei Bingai	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
45	Kecamatan Binjai	sudah diterima	
46	Kecamatan Stabat	BELUM MENGIRIM	Data DPA Belum Sesuai dan Belum Final; Belum Mengirim Laporan
47	Kecamatan Wampu	sudah diterima	
48	Kecamatan Secanggang	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
49	Kecamatan Hinal	sudah diterima	
50	Kecamatan Tanjung Pura	sudah diterima	
51	Kecamatan Gebang	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
52	Kecamatan Babalan	sudah diterima	
53	Kecamatan Berandan Barat	BELUM MENGIRIM	Belum Mengirim Laporan
54	Kecamatan Sei Lapan	sudah diterima	
55	Kecamatan Pangkalan Susu	sudah diterima	
56	Kecamatan Besitang	sudah diterima	
57	Kecamatan Padang Tualang	sudah diterima	
58	Kecamatan Sawit Seberang	sudah diterima	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 13. Notula Rapat Koordinasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20814,
Telepon (061) 8910202 Faksimile (061) 8910603,
Laman www.langkatkab.go.id, Pos-el sekretariat@langkatkab.go.id

NOTULA

- Rapat** : Rapat Koordinasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024.
- Hari/Tanggal** : Rabu dan Kamis, 21 dan 22 Agustus 2024.
- Surat Undangan** : Nomor 000.1.5-1797/Adbang/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Waktu Rapat** : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai.
- Acara** : 1. Pendahuluan
2. Arahani
3. Evaluasi dan koordinasi
4. Penutup.
- Pimpinan Rapat**
- Ketua** : T. Syafrie Elza Hadi Prawira, S.STP, M.AP
(Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat).
- Sekretaris** : Khoirul Ma'arif, S.Kom
(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat).
- Pencatat** : Mahriza Indah
(Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat).
- Peserta Rapat** : 1. Rapat hari pertama dihadiri oleh para personil yang menangani pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 dari semua Perangkat Daerah se-Kabupaten Langkat kecuali Kecamatan, serta RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat..
2. Sedangkan hari kedua dihadiri oleh peserta dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Langkat dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat,
3. Para Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat.
- Kegiatan Rapat** : Kegiatan rapat yang dilaksanakan pada hari pertama dan kedua pada dasarnya sama, yang membedakan hanya pesertanya saja. Adapun kegiatannya sebagai berikut:
1. Pendahuluan
Rapat diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat
 2. Arahani
Rapat dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Langkat yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Lampiran 14. Capture Kegiatan Koordinasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD pada Grup WhatsApp SIMERAK Langkat

